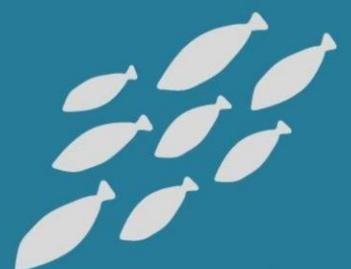




**DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN
ALAT PENANGKAPAN IKAN**

**LAPORAN
KINERJA
TAHUN 2021**



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2021 telah selesai disusun. Penyusunan laporan kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Insatansi Pemerintah. Laporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang seharusnya dicapai serta menjadi upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran tahun 2021. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja melalui pelaksanaan kegiatan dan program, kendala, serta upaya penyelesaian agar tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana ditetapkan melalui Indikator Kinerja.

Selain itu, Laporan Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mempunyai peran sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja yang terukur, disamping itu juga sebagai alat untuk mendorong peningkatan kinerja guna terwujudnya *good governance* di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2021.

Dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2021 terdapat 11 (sebelas) Indikator Kinerja, yaitu (1) Jumlah kapal perikanan yang terstandarisasi, terdaftar dan/atau yang memenuhi ketentuan (unit); (2) Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan memenuhi ketentuan (unit); (3) Persentase mesin dan kapal perikanan yang dihitung produktivitasnya dan terpantau operasionalnya (persen); (4) Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi (orang); (5) Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki (skala kemandirian); (6) Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks); (7) Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai); (8) Persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar (persen); (9) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen); (10) Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen); (11) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen).

Capaian IKU merupakan bentuk kongkrit kinerja unit kerja dalam mendukung “Terwujudnya Pengelolaan sarana perikanan tangkap dan pengawakan kapal perikanan yang berdaya saing untuk Kesejahteraan Nelayan”, maka dengan tersusunnya laporan kinerja Tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan pencapaian indikator kinerja utama pada tahun 2022.

Jakarta, 15 Januari 2022

Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

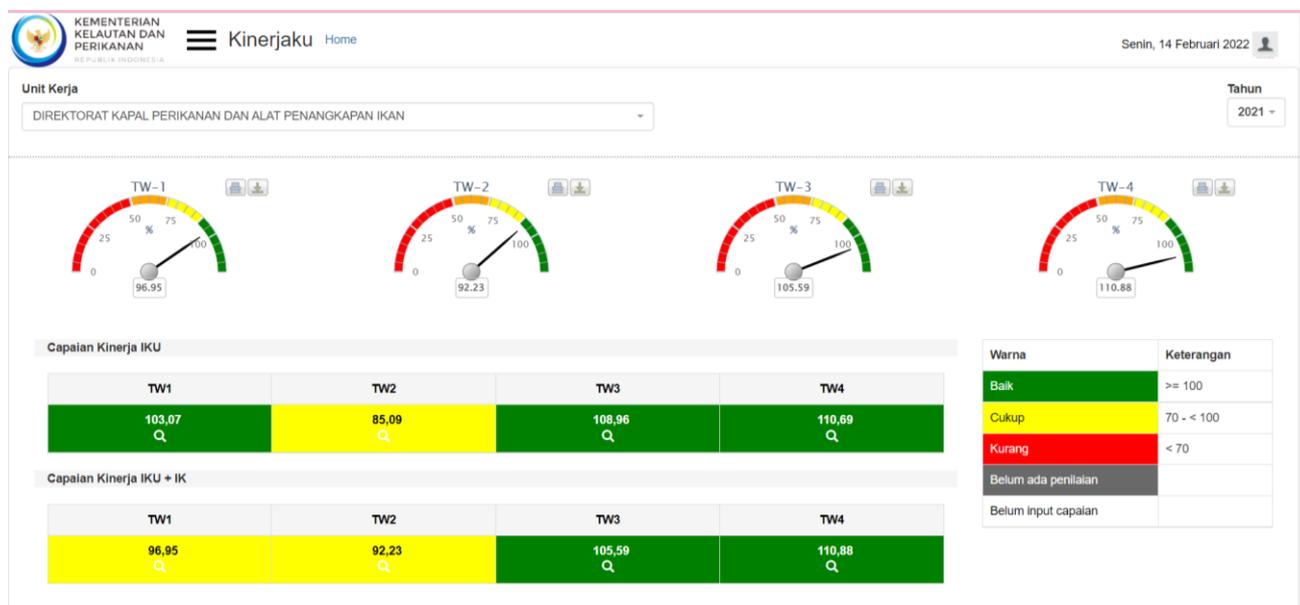


MANSUR

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan tahapan penting dalam implementasi SAKIP terutama di era saat ini dimana masyarakat menaruh harapan yang tinggi terhadap kinerja pemerintah. Melalui penyajian data dan informasi kinerja serta permasalahan dan kendala yang dihadapi yang tertuang dalam Laporan Kinerja menjadikan penyusunan laporan kinerja mempunyai point penting sebagai sarana berkomunikasi dengan masyarakat dan sebagai *feedback* terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan, sehingga KKP dapat terus melakukan upaya perbaikan terhadap dari tahun ke tahun untuk menghasilkan kinerja yang terbaik dalam melayani masyarakat kelautan dan perikanan.

Laporan Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2021 merupakan laporan pertanggung jawaban kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dalam mencapai sasaran strategis yang disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja. Laporan ini disusun melalui pengukuran indikator kinerja Tahun 2021. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja dalam dokumen-dokumen perjanjian kinerja dengan hasil pengukuran kinerja. Realisasi pencapaian target Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagai berikut:



Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 201 sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Target Tahunan	Capaian Tahunan	%
1. Pengelolaan sarana perikanan tangkap yang berdaya saing				
1.	Jumlah kapal perikanan yang terbangun, terstandarisasi, terdaftar dan/atau yang memenuhi ketentuan (unit)	3.400	5.772	169,76
2.	Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan memenuhi ketentuan (unit)	12.000	12.525	104,4
3.	Persentase mesin dan kapal perikanan yang dihitung produktivitasnya dan terpantau operasionalnya (persen)	100	111,88	111,88
2. Pengelolaan awak kapal perikanan yang berdaya saing				
4.	Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi (orang)	15.000	89.550	597
3. Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri				
5.	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki (tingkat kemandirian 1-5)	4	4	100
4. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan				
6.	Indeks Profesionalitas Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	73	78,45	107,46
7.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	85,15	85,56	100,48
8.	Persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar (persen)	84	79,94	95,16
9.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	65	100	153,84
10.	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	72,5	95,51	131,73
11.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	72,5	80	110,34

Berdasarkan Tabel 1, dari 11 (sebelas) Indikator Kinerja pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebanyak 10 Indikator tercapai dan 1 indikator yang belum optimal mencapai target yaitu Persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar dengan capaian 95,16% dengan realisasi 79,94% dari target sebesar 84%. Hal ini disebabkan kurangnya keaktifan pegawai pada Triwulan I dalam memposting atau mengupdate informasi pada aplikasi Bitrix24 sehingga menyebabkan perhitungan rata-rata pada triwulan berikutnya menjadi rendah. Kedepan, diharapkan seluruh pegawai yang terdaftar dalam aplikasi Bitrix24 supaya memposting dan mengupdate informasi seputar perikanan tangkap sesuai dengan kriteria informasi narasi yang memenuhi unsur 5W + 1H yaitu *What, Where, When, Who, Why, dan How*.

DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.3. Permasalahan Utama	4
1.4. Sistematika Penyajian	4
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	5
2.1. Rencana Strategis	5
2.2. Tujuan	5
2.3. Sasaran Kegiatan	6
2.4. Rencana Kinerja Tahunan	15
2.5. Penetapan Kinerja	22
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1. Sasaran Kegiatan (SK-1) : Pengelolaan sarana perikanan tangkap yang berdaya saing	31
3.1.1. IKU.01. Jumlah kapal perikanan yang terstandarisasi, terdaftar dan/atau yang memenuhi ketentuan (unit)	31
3.1.2. IKU.02. Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan memenuhi ketentuan (unit)	37
3.1.3. IKU.03. Persentase mesin dan kapal perikanan yang dihitung produktivitasnya dan terpantau operasionalnya (persen);	43
3.2. Sasaran Kegiatan (SK-2) : Pengelolaan awak kapal perikanan yang berdaya saing	51
3.2.1. IKU.04. Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi (orang)	51
3.3. Sasaran Kegiatan (SK-3) : Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri	54
3.3.1. IKU.05. Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki (skala kemandirian)	54
3.4. Sasaran Kegiatan (SK-4) : Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	58
3.4.1. IKU.06. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	58
3.4.2. IK.07. Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	59
3.4.3. IK.08. Persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar (persen)	60
3.4.4. IK.09. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	62
3.4.5. IK.10. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	63
3.4.6. IK.11. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	64
BAB IV. PENUTUP	67
BAB V. LAMPIRAN	68

Daftar Tabel

Tabel 1. Sasaran Kegiatan per Triwulan Tahun 2021	6
Tabel 2. Sasaran Kegiatan per Triwulan Tahun 2021 Revisi I	7
Tabel 3. Sasaran Kegiatan per Triwulan Tahun 2021 Revisi II	11
Tabel 4. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2021	15
Tabel 5. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2021 Pasca Refocusing Tahap IV	17
Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021	25
Tabel 7. Capaian jumlah kapal perikanan yang terbangun, terstandarisasi, terdaftar dan / atau yang memenuhi ketentuan Tahun 2021	27
Tabel 8. Jumlah persetujuan pengadaan kapal perikanan Tahun 2021	27
Tabel 9. Jumlah pendaftaran kapal perikanan Tahun 2021	29
Tabel 10. Jumlah penerbitan pemeriksaan fisik melalui Aplikasi SICEFI Tahun 2021	31
Tabel 11. Daftar Lokasi Tujuan Pengiriman, Kode dan Kuantitas Pengadaan Alat Penangkapan Ikan (API) Tahun 2021	34
Tabel 12. Capaian jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan memenuhi ketentuan Tahun 2021	37
Tabel 13. Capaian persentase mesin dan kapal perikanan yang dihitung produktivitasnya dan terpantau operasionalnya tahun 2021	38
Tabel 14. Rincian data produktivitas kapal penangkap ikan	39
Tabel 15. Rincian Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sarana Penangkapan Ikan (BSPI)	41
Tabel 16. Rincian Pelayanan Permesinan di Sentra Nelayan Tahun 2021	44
Tabel 17. Capaian jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi Tahun 2021	46
Tabel 18. Capaian tingkat kemandirian sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) saumlaki Tahun 2021	51
Tabel 19. Capaian persentase indeks profesionalitas ASN Tahun 2021	53
Tabel 20. Capaian nilai rekonsiliasi kinerja Tahun 2021	54
Tabel 21. Capaian persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar Tahun 2021	56
Tabel 22. Capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2021	57
Tabel 23. Capaian tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2021	58
Tabel 24. Capaian tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen) Tahun 2021	59
Tabel 25. Saldo Awal Semester 1 Tahun 2021	60
Tabel 26. Neraca 30 Juni Tahun 2021	60

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pembangunan Kelautan dan Perikanan periode 2020-2024 mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan arahan-arahan Presiden, yaitu (1) membangun komunikasi dengan stakeholders kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya sehingga diharapkan dapat memberikan peran dan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, serta konsumsi ikan masyarakat, yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang terjaga.

Potensi pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap Indonesia masih sangat besar, yaitu potensi lestari sebesar 12,54 juta ton per tahun (Keputusan Menteri KKP Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia), dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 10,03 juta ton per tahun atau sekitar 80 persen dari potensi lestari, serta pemanfaatan usaha yang baru mencapai sebesar 6,98 juta ton pada tahun 2019 (data sementara) atau baru 69,59% dari JTB. Adapun total produksi perikanan tangkap di perairan darat baru mencapai 0,55 juta ton pada tahun 2019.

Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan diarahkan untuk pemanfaatan sumber daya ikan secara optimal dan berdaya saing. Sehingga pada akhirnya dapat tercipta pertambahan nilai sumber daya perikanan yang lebih berkelanjutan. Semakin strategisnya posisi Indonesia pada sistem perikanan global, mendorong pengelolaan perikanan Indonesia untuk lebih mandiri dan berdaya saing.

Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan dilaksanakan melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2021, dan pertanggung jawabannya harus dilakukan secara transparan dan akuntabilitas. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran berbentuk laporan. Laporan yang dimaksud adalah laporan yang berisi penerapan manajemen kinerja dan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Oleh karena itu, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagai salah satu instansi pemerintah pusat dibawah lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih sebagai cita-cita bangsa dan negara serta seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga dalam struktur pemerintahan harus dapat menjalankan tugasnya yang dapat diukur yaitu mengembangkan pola kerja berbasis Kinerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan program dan dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja pada periode Triwulan IV Tahun 2021. Pelaporan kinerja ini menyajikan informasi atas kinerja yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Triwulan IV Tahun 2021. Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan ini merupakan gambaran informasi tentang capaian kinerja (sasaran kegiatan dan indikator kinerja).

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan merupakan salah satu direktorat dibawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang beralamat di Gedung Mina Bahari II Jalan Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta. Berdasarkan Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan.

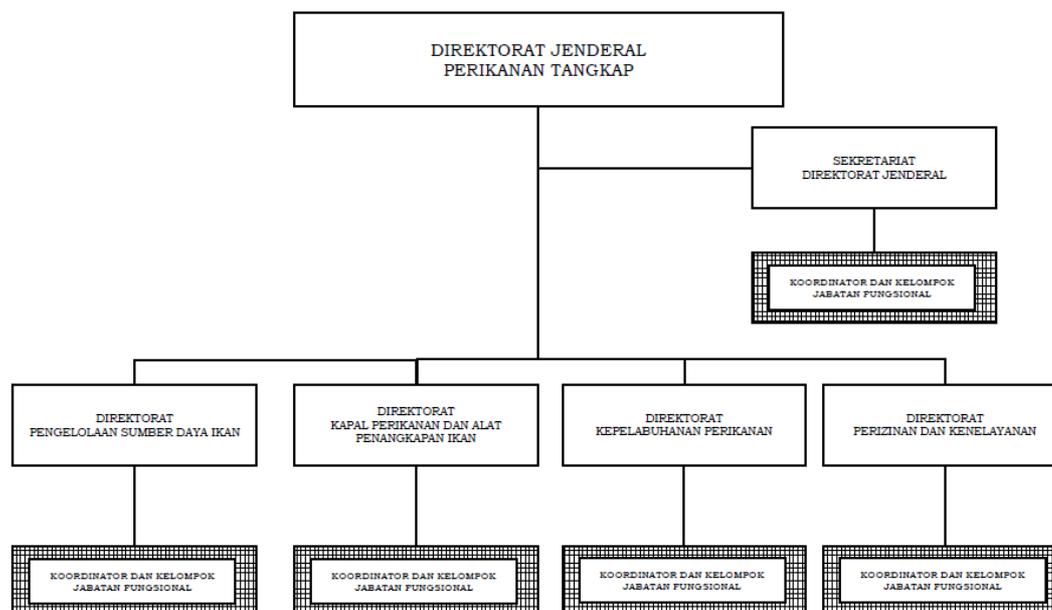
Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Sutruktur organisasi Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yaitu :

- a. Bidang Kapal Perikanan
- b. Bidang Alat Penangkapan Ikan
- c. Bidang Pengawakan Kapal Perikanan
- d. Bidang Permesinan dan Operasional Kapal Perikanan

Struktur organisasi dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Terhitung mulai tanggal 21 Juni 2021 Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dipimpin oleh Ir. Mansur, MM selaku Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 70 orang terdiri dari PNS 59 orang dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 11 orang.

Jumlah PNS menurut Golongan terdiri dari:

NO	JENIS KELAMIN	GOLONGAN																					
		Ia	Ib	Ic	Id	JML	IIa	IIb	IIc	IId	JML	IIIa	IIIb	IIIc	IIId	JML	IVa	IVb	IVc	IVd	IVe	JML	TOTAL
1	LAKI-LAKI								1	1	2	11	5	10	8	35	5	2	1			8	44
2	PEREMPUAN								2	1	3	3	1	2	4	10	2					2	15
TOTAL									3	2	5	14	6	13	12	45	7	2	1			10	59

Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan terdiri dari:

NO	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN											JUMLAH									
		S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD										
1	LAKI-LAKI		17	12	7		1			7												44
2	PEREMPUAN		4	6			3			2												15
TOTAL			21	18	7		4			8												59

Jumlah TKK menurut Tingkat Pendidikan terdiri dari:

NO	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN											JUMLAH									
		S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD										
1	LAKI-LAKI			1	2		1															4
2	PEREMPUAN			5	1					1												7
TOTAL				6	3		1			1												11

*Data Per Desember 2021

1.2. Permasalahan Utama

Pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap belum optimal sesuai dengan nilai tangkapan maksimum lestari (maximum sustainable yield / MSY) secara berkelanjutan. Ketersediaan sumber daya ikan menjadi pilar utama dalam mewujudkan pembangunan perikanan tangkap secara optimal dan berkelanjutan. Ketersediaan sumber daya ikan dipengaruhi faktor internal ikan khususnya terkait dengan kemampuan regenerasi ikan terhadap perubahan lingkungan baik akibat faktor alam maupun aktivitas manusia. Oleh karena itu, faktor kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan harus menjadi faktor kendali untuk menjamin ketersediaan sumber daya ikan secara berkelanjutan.

Fakta empiris menunjukkan bahwa terjadinya degradasi sumber daya ikan sebagian besar akibat aktivitas manusia dalam mengeksploitasi sumber daya ikan yang melebihi batas kemampuan ikan untuk melakukan regenerasi. Oleh karena itu, tuntutan kebutuhan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan yang berdaya saing dalam mengeksploitasi sumber daya ikan (kepentingan ekonomi) harus seimbang dengan tuntutan ketersediaan sumber daya ikan di masa mendatang (kepentingan sumber daya ikan dan lingkungannya).

Permasalahan-permasalahan pokok sumber daya ikan yang menjadi tantangan dalam pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan, sebagai berikut :

- a. Masih terdapat kapal perikanan yang belum terstandarisasi, terdaftar dan/atau yang memenuhi ketentuan;
- b. Masih terdapat alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang belum memenuhi ketentuan;
- c. Rendahnya produktivitas kapal perikanan;
- d. Rendahnya pemahaman nelayan tentang perawatan dan operasional permesinan dan kapal perikanan;
- e. Sebagian besar awak kapal perikanan belum tersertifikasi/terlindungi;
- f. Keterbatasan akses konektivitas usaha perikanan tangkap Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki;
- g. Peningkatan Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;

1.4. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKj Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2021 disusun dengan urutan penyajian sebagai berikut :

- a. Bab I – Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi;
- b. Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran kegiatan, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021;
- c. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menguraikan matriks target dan realisasi kinerja serta akuntabilitas pengelolaan keuangan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Triwulan IV tahun anggaran 2021;
- d. Bab IV – Penutup, berisi kesimpulan secara umum tentang pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2021.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Pengelolaan perikanan tangkap dilakukan melalui peningkatan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan, permesinan dan operasional kapal perikanan, serta pengawakan kapal perikanan dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Pengembangan armada perikanan tangkap nasional yang kompetitif dan produktif melalui utilisasi armada perikanan tangkap sebagai sarana prasarana utama produksi; 2) Peningkatan kapasitas dan selektivitas penggunaan alat penangkapan ikan; 3) Pengembangan kapasitas awak kapal perikanan dapat dianggap sebagai ujung tombak dalam upaya menciptakan pengelolaan perikanan yang seimbang; 4) Peningkatan efisiensi dan produktivitas permesinan dan operasional kapal perikanan. Perangkat armada perikanan tangkap diharapkan bukan hanya mampu menghasilkan volume produksi yang tinggi, namun juga produk perikanan yang lebih berdaya saing, serta sekaligus dapat menjaga stabilitas ekosistem perikanan dan daya dukung lingkungan. Tingginya peluang pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah perairan Indonesia, serta rencana akselerasi di ZEEI dan laut lepas perlu direspon melalui konsep industrialisasi armada penangkapan ikan, yakni meliputi: peningkatan efisiensi-kemampuan jangkauan operasional, kualitas hasil tangkapan, serta jaminan ketenagakerjaan.

Sistem manajemen armada penangkapan ikan mulai dari pendaftaran, penandaan, persetujuan dan evaluasi operasional perlu diperkuat pada lingkup nasional untuk dapat mewujudkan konsep industrialisasi yang berkelanjutan. Restrukturisasi armada perikanan harus menciptakan kinerja yang lebih efisien melalui adopsi teknologi ramah lingkungan yang telah teradaptasi kearifan lokal. Pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan pun perlu ditingkatkan sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan pemahaman maupun kapasitas nelayan dalam pemanfaatannya. Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan antara lain : 1) Pengembangan industri perkapalan nasional, untuk mendukung pergerakan industri perikanan nasional; 2) Intensifikasi tata kelola kapal perikanan nasional, khususnya pada kapal izin daerah dan kapal perikanan swasta; 3) Peningkatan keterlibatan pada tata kelola awak kapal perikanan; dan 4) Peningkatan manajemen data armada perikanan nasional.

2.2. TUJUAN

Dalam upaya mewujudkan peningkatan produktivitas kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan serta permesinan dan operasional kapal perikanan, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a. Restrukturisasi dan modernisasi kapal perikanan, alat penangkapan ikan, mesin dan alat penangkapan ikan;
- b. Peningkatan produktivitas penggunaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
- c. Peningkatan standardisasi kapal perikanan yang memenuhi aspek laik laut, laik tangkap dan laik simpan;
- d. Peningkatan standar rancang bangun, keselamatan dan keamanan kerja di kapal perikanan;
- e. Peningkatan nilai ekonomi ikan hasil tangkapan melalui peningkatan kualitas penanganan ikan di atas kapal perikanan (CPIB);

- f. Manajemen tata kelola (pendaftaran, penandaan, persetujuan pembangunan kapal dan pemantauan operasional) kapal perikanan nasional secara elektronik dan terintegrasi;
- g. Optimalisasi dan mekanisasi penangkapan ikan dengan penerapan rekayasa teknologi penangkapan pada alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan armada perikanan tangkap; dan
- h. Perlindungan dan peningkatan kapasitas awak kapal perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan awak kapal perikanan.

2.3. SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagai suatu *outcome/impact* dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan. Pada awal tahun 2021, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan menetapkan Sasaran Kegiatan (SK) disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sasaran Kegiatan per Triwulan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4	Tahun 2021
1.	Pengelolaan sarana perikanan tangkap yang berdaya saing					
1.	Jumlah kapal perikanan yang terbangun, terstandarisasi, terdaftar dan/atau yang memenuhi ketentuan (unit)	1.100	2.500	5.000	6.760	6.760
2.	Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan memenuhi ketentuan (unit)	475	500	600	750	750
3.	Persentase mesin dan kapal perikanan yang dihitung produktivitasnya dan terpantau operasionalnya (persen)	40	60	80	100	100
2.	Pengelolaan awak kapal perikanan yang berdaya saing					
4.	Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi (orang)	11.950	12.900	13.950	15.000	15.000
3.	Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri					
5.	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki (tingkat kemandirian 1-5)				4	4
4.	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan					
6.	Indeks Profesionalitas Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)		65	65	73	73
7.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)				85,15	85,15
8.	Persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar (persen)	83	83	83	83	83
9.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	65	65	65	65	65
10.	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)				72,5	72,5
11.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)				72,5	72,5

Tw: Triwulan

Sehubungan dengan pemotongan/refocusing anggaran tahap I pada tahun 2021, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan melakukan revisi terhadap Sasaran Kegiatan (SK) tahun 2021 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Sasaran Kegiatan per Triwulan Tahun 2021 Revisi I

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4	Tahun 2021
1.	Pengelolaan sarana perikanan tangkap yang berdaya saing					
1.	Jumlah kapal perikanan yang terbangun, terstandarisasi, terdaftar dan/atau yang memenuhi ketentuan (unit)	1.100	1.670	2.535	3.400	3.400
2.	Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan memenuhi ketentuan (unit)				12.000	12.000
3.	Persentase mesin dan kapal perikanan yang dihitung produktivitasnya dan terpantau operasionalnya (persen)	40	60	80	100	100
2.	Pengelolaan awak kapal perikanan yang berdaya saing					
4.	Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi (orang)	11.950	12.900	13.950	15.000	15.000
3.	Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri					
5.	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki (tingkat kemandirian 1-5)				4	4
4.	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan					
6.	Indeks Profesionalitas Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)		65		73	73
7.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)				85,15	85,15
8.	Persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar (persen)	83	83	83	83	83
9.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	65	65	65	65	65
10.	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)				72,5	72,5
11.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)				72,5	72,5

Tw: Triwulan

Adapun justifikasi perubahan target jumlah kapal perikanan yang terbangun, terstandarisasi, terdaftar dan/atau yang memenuhi ketentuan dari 6.760 unit menjadi 3.400 unit adalah perubahan rincian output (RO) pada bidang pelayanan publik. Sehingga yang dihitung adalah jumlah layanan (permohonan yang disetujui) yang terdiri dari : 1) cek fisik kapal sebanyak 2.000 unit; 2) Buku Kapal Perikanan sebanyak 1.250 unit, dan 3) Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan sebanyak 150 unit. Sedangkan justifikasi perubahan target jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan memenuhi ketentuan dari 750 unit menjadi 12.000 unit adalah perubahan harga satuan pengadaan alat penangkapan ikan pada revisi RKAKL 2021 yang merubah volume output dari semula 750 menjadi 12.000 dan revisi target semula per triwulan menjadi tahunan.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 3519070 (EXT:1239), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAMAN: <https://kkp.go.id/djpt>. SURAT ELEKTRONIK: djpt@kkp.go.id

Nomor : B.9741/DJPT/TU.140 D2/MII/2021

23 Juli 2021

Perihal : Perubahan Target dan Capaian pada Aplikasi Kinerjaaku
Lampiran : 1 berkas

Yth. Kepala Biro Perencanaan KKP
Di Jakarta

Menindaklanjuti surat kami nomor : B.9334/DJPT/TU.140 D2/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan justifikasi perubahan target tahunan dan capaian triwulan I tahun 2021 sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target Tahunan		Capaian Triwulan I		Justifikasi
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1.	Jumlah kapal perikanan yang terbangun, terstandarisasi, terdaftar dan/atau yang memenuhi ketentuan (unit)	6.760	3.400			Terdapat perubahan rincian output (RO) pada bidang pelayanan public (BAH). Sehingga yang dihitung adalah jumlah layanan (permohonan yang disetujui) per satuan RO yang terdiri dari : a. Cek Fisik Kapal (2.000); b. Buku Kapal Perikanan (1.250), dan c. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (150)
2.	Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan memenuhi ketentuan (unit)	750	12.000	477	0	Terdapat perubahan harga satuan pengadaan alat penangkapan ikan pada revisi RKAKL 2021. Sehingga merubah volume output dari semula 750 menjadi 12.000 dan revisi target semula per triwulan menjadi tahunan.

Dengan dokumen pendukung sebagaimana terlampir

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Direktur Kapal Perikanan dan Alat
Penangkapan Ikan



Ir. MANSUR, MM
NIP. 196603121991031002

Tembusan :
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Lampiran 1. Data dukung Jumlah kapal perikanan yang terbangun, terstandarisasi, terdaftar dan/atau yang memenuhi ketentuan (unit)

		RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021				Halaman 11	
KEMENLEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
UNIT ORG	(03)	Dijon Perikanan Tangkap					
UNIT KERJA	(236720)	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP					
ALOKASI	Rp.310,800,769,000						
KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SDP/ CP		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
521211	Belanja/Bahan (KPPN 175-Jakarta VI) - Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (50 orang x 2 kali rapat) (0 orang x 6 kali) - Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (50 orang x 3 kali rapat) (0 orang x 6 kali) - ATK - Bahan Komputer	100.0 ok 100.0 ok 1.0 paket 1.0 paket	22,000 47,000 500,000 604,000	2,200,000 4,700,000 500,000 604,000	8,064,000	RM	
524111	Belanja/Pejalanan Dinas Biasa (KPPN 175-Jakarta VI) - Perjalanan dalam rangka Peritatan dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi awak kapal perikanan Koordinasi dan Kerjasama dengan instansi Terkait Bidang Sertifikasi Awak Kapal Perikanan	16.0 ok	6,214,000	99,424,000	99,424,000	RM	
524111	Belanja/Pejalanan Dinas Biasa (KPPN 175-Jakarta VI) - Perjalanan dalam rangka koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait	26.0 ok	6,500,000	169,000,000	169,000,000	RM	
524113	Belanja/Pejalanan Dinas Dalam Kota (KPPN 175-Jakarta VI) - transport lokal dalam rangka koordinasi dengan instansi terkait	70.0 ok	150,000	10,500,000	10,500,000	RM	
524119	Belanja/Pejalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN 175-Jakarta VI) - perjalanan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait	36.0 ok	1,000,000	36,000,000	36,000,000	RM	
2337.BAH	Polysian Publik Lainnya Lokasi: KOTA JAKARTA PUSAT	3400.0 layanan		4,320,000,000	4,320,000,000		
2337.BAH.001	Kapal perikanan yang memenuhi standar laik tangkap dan laik simpan	2000.0 layanan		2,600,000,000	2,600,000,000	U	
051	Pengurusan/revisi pedoman kapal perikanan yang memenuhi standar laik tangkap dan laik simpan			62,350,000	62,350,000	U	
A	Penyusunan standar kapal non konvensional kapal perikanan (non perikanan umum standar dan kelas standar)			307,550,000	307,550,000		
	- Pengurusan untuk pengujian umum rangka pemrosesan dek fisk kapal perikanan	300.0 ok	1,000,000	300,000,000	300,000,000		
2337.BAH.002	Kapal perikanan yang terdaftar	1250.0 layanan		1,334,300,000	1,334,300,000	U	
052	Pelaksanaan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan nasional			1,334,300,000	1,334,300,000	U	
A	Evaluasi Implementasi Pendaftaran Kapal Perikanan			200,400,000	200,400,000		
021211	Belanja/Bahan (KPPN 175-Jakarta VI) - Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (0 orang x 0 kali) - Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (0 orang x 0 kali) - Makan Rapat Biasa dalam rangka Sosialisasi/Gerai (40 orang x 4 kali x 1 hr) - Snack Rapat Biasa dalam rangka Sosialisasi/Gerai (40 orang x 4 kali x hr) - ATK - Bahan Komputer - penggantian Laporan	100.0 OK 100.0 OK 150.0 ok 150.0 ok 1.0 paket 1.0 paket 1.0 paket	48,000 22,000 47,000 22,000 800,000 800,000 800,000	4,800,000 2,200,000 7,020,000 3,520,000 800,000 800,000 800,000	20,440,000	RM	
021213	Belanja Honor Output Kegiatan (KPPN 175-Jakarta VI) - Honorarium Penanggung Jawab Panitia Kegiatan (1 org x 4 kali) - Honorarium Ketua Panitia Kegiatan (1 org x 4 kali) - Honorarium Anggota Panitia Kegiatan (4 org x 4 kali)	4.0 OK 4.0 OK 16.0 OK	450,000 400,000 300,000	1,800,000 1,600,000 4,800,000	8,200,000	RM	
524111	Belanja/Pejalanan Dinas Biasa (KPPN 175-Jakarta VI) - Pejalan dinas dalam rangka Sosialisasi implementasi pendaftaran kapal perikanan kewenang pusat (4 orang x 4 lokasi) (0 orang x 0 kali)	16.0 ok	8,860,000	141,760,000	141,760,000	RM	
2337.BAH.003	Penetapan/pengadaan kapal perikanan yang memenuhi ketentuan	150.0 layanan		385,700,000	385,700,000	U	
052	Pelaksanaan penetapan/pengadaan kapal perikanan			161,750,000	161,750,000	U	
A	Pelaksanaan penetapan/pengadaan kapal perikanan			161,750,000	161,750,000		
521211	Belanja/Bahan (KPPN 175-Jakarta VI) - ATK - Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (0 orang x 0 kali) - Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (0 orang x 0 kali)	15.0 PKT 150.0 OK 150.0 OK	300,000 48,000 22,000	5,250,000 7,200,000 3,300,000	21,750,000	RM	
				3,300,000	3,300,000	SBM	

Lampiran 2. Data Dukung Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan memenuhi ketentuan (unit)

- Rincian Kertas Kerja Satker Sebelum Revisi

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 UNIT ORG (03) Ditjen Perikanan Tangkap
 UNIT KERJA (238720) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
 ALOKASI Rp.337,525,406,000

Halaman : 25

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Pembangunan kapal penangkap ikan ukuran 30 GT	2,0 Unit	1.300.000,000	2.600.000,000	
	- Pembelian mesin untuk kapal penangkap ikan 30 GT	2,0 Unit	385.000,000	770.000,000	
	- Pengiriman kapal penangkap ikan 30 GT	2,0 Unit	202.000,000	404.000,000	
	- Alat Penangkapan Ikan	2,0 PKT	500.000,000	1.000.000,000	
B	Pendukung Pembangunan Kapal Perikanan				
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			176.000,000	RM
	(KPPN-175-Jakarta VI)			104.000,000	
	- Biaya operasional sekali melaut	2,0 PKT	39.000,000	78.000,000	
	- Biaya Pengurusan Dokumen Kapal (Surat Ukur, Grosse Akta, Surat Kelengkapan Kapal dan Pas Tahunan)	2,0 PKT	13.000,000	26.000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			72.000,000	RM
	(KPPN-175-Jakarta VI)				
	- Perjalanan dinas dalam rangka cek progres, sea trial, dan serah terima	12,0 ok	6.000,000	72.000,000	
2337.QEG.002	Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang disalurkan	780,0 Unit		7.500.000,000	
052	Penyusunan dan/atau pelaksanaan bantuan			717.510,000	U
A	Pengadaan Paket Bantuan			172.210,000	
521211	Belanja Bahan			22.010,000	RM
	(KPPN-175-Jakarta VI)				
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (30 orang x 0 kali)	300,0 OK	47,000	14.100,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (30 orang x 0 kali)	300,0 OK	22,000	6.600,000	
	- ATK	1,0 paket	810,000	810,000	
	- Bahan Komputer	1,0 paket	500,000	500,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			90.000,000	RM
	(KPPN-175-Jakarta VI)				
	- Perjalanan dalam rangka Penyaluran Penyuluhan Bantuan API (30 orang x 0 kali)	15,0 ok	6.000,000	90.000,000	
B	Seleksi, Verifikasi dan Penetapan Calon Penerima			605.500,000	
521211	Belanja Bahan			21.700,000	RM
	(KPPN-175-Jakarta VI)				
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (40 org x 3 kep x 4 kali) (30 orang x 0 kali)	300,0 OK	47,000	14.100,000	
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA (40 org x 3 kep x 4 kali) (30 orang x 0 kali)	300,0 OK	22,000	6.600,000	
	- ATK	1,0 paket	500,000	500,000	
	- Bahan Komputer	1,0 paket	500,000	500,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			420.000,000	RM
	(KPPN-175-Jakarta VI)				
	- Perjalanan dalam rangka Seleksi, Verifikasi dan Penetapan Calon Penerima (30 orang x 0 kali)	60,0 ok	6.000,000	300.000,000	
	- Perjalanan dalam rangka Seleksi, Verifikasi dan Penetapan Calon Penerima (30 orang x 0 kali)	20,0 ok	6.000,000	120.000,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			163.800,000	RM
	(KPPN-175-Jakarta VI)				
	- Biaya Paket Kegiatan Pertemuan Fullboard di Luar Kota dalam Rangka FGD (30 orang x 3 hari)	90,0 ok	820,000	73.800,000	
	- Perjalanan dalam rangka penyuluhan bantuan API (25 orang)	30,0 ok	3.000,000	90.000,000	
052	Penyusunan dan/atau pelaksanaan bantuan			6.458.800,000	U

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 UNIT ORG (03) Ditjen Perikanan Tangkap
 UNIT KERJA (238720) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
 ALOKASI Rp.310,800,769,000

Halaman : 26

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B	Pendukung Pembangunan Kapal Perikanan			176.000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			104.000,000	RM
	(KPPN-175-Jakarta VI)				
	- Biaya operasional sekali melaut	2,0 PKT	39.000,000	78.000,000	
	- Biaya Pengurusan Dokumen Kapal (Surat Ukur, Grosse Akta, Surat Kelengkapan Kapal dan Pas Tahunan)	2,0 PKT	13.000,000	26.000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			72.000,000	RM
	(KPPN-175-Jakarta VI)				
	- Perjalanan dinas dalam rangka cek progres, sea trial, dan serah terima	12,0 ok	6.000,000	72.000,000	
2337.QEG.002	Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang disalurkan	12000,0 Unit		6.458.800,000	
052	Penyusunan dan/atau pelaksanaan bantuan			6.458.800,000	U
A	Pengadaan Paket Bantuan			6.000.000,000	
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda			6.000.000,000	RM
	(KPPN-175-Jakarta VI)				
	- Pengadaan dan penyaluran bantuan alat penangkapan ikan	12000,0 unit	500,000	6.000.000,000	
B	Dukungan Penyaluran Bantuan API			458.800,000	
521211	Belanja Bahan			28.000,000	RM
	(KPPN-175-Jakarta VI)				
	- ATK	1,0 paket	1.325,000	1.325,000	
	- perlengkapan peserta	25,0 paket	300,000	7.500,000	
	- makan rapat biasa	75,0 ok	47,000	3.525,000	
	- snack rapat biasa	75,0 ok	22,000	1.650,000	
	- penggandaan	2,0 paket	1.000,000	2.000,000	
	- peralatan pemeriksaan API	6,0 paket	2.000,000	12.000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			306.800,000	RM
	(KPPN-175-Jakarta VI)				
	- Perjalanan dalam rangka dukungan penyaluran bantuan API (25 org x 3 hari)	52,0 ok	5.900,000	306.800,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			124.000,000	RM
	(KPPN-175-Jakarta VI)				
	- Biaya Paket Kegiatan Pertemuan Fullboard di Luar Kota dalam Rangka FGD (30 orang x 3 hari x 2 kali)	75,0 ok	820,000	61.500,000	
	- Perjalanan dinas dalam rangka penyaluran bantuan API (25 orang)	25,0 ok	2.500,000	62.500,000	

Sehubungan dengan refocusing anggaran tahap IV, Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mengalami perubahan pada Tahun 2021. Adapun revisi terhadap Sasaran Kegiatan (SK) tahun 2021 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Sasaran Kegiatan per Triwulan Tahun 2021 Revisi II

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4	Tahun 2021
1.	Pengelolaan sarana perikanan tangkap yang berdaya saing					
	1. Jumlah kapal perikanan yang terbangun, terstandarisasi, terdaftar dan/atau yang memenuhi ketentuan (unit)	1.100	1.670	2.535	3.400	3.400
	2. Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan memenuhi ketentuan (unit)				12.000	12.000
	3. Persentase mesin dan kapal perikanan yang dihitung produktivitasnya dan terpantau operasionalnya (persen)	40	60	80	100	100
2.	Pengelolaan awak kapal perikanan yang berdaya saing					
	4. Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi (orang)	11.950	12.900	13.950	15.000	15.000
3.	Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri					
	5. Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki (tingkat kemandirian 1-5)				4	4
4.	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan					
	6. Indeks Profesionalitas Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)		65		73	73
	7. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)				85,15	85,15
	8. Persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar (persen)	84	84	84	84	84
	9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	65	65	65	65	65
	10. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)				72,5	72,5
	11. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)				72,5	72,5

Adapun justifikasi perubahan target Persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar dari 83 menjadi 84 yaitu target disesuaikan dengan Nota Dinas dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : M.158/DJPT/KP.560.S2/II/2021 perihal Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Tahun 2021.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMARAN www.kkp.go.id

Nomor : B.12718/DJPT.3/RC.610/X/2021

5 Oktober 2021

Sifat : Biasa

Perihal : Perubahan Target dan Capaian pada Aplikasi Kinerja

Lampiran : 1 berkas

Yth. Kepala Biro Perencanaan KKP
Di Jakarta

Sehubungan dengan Perjanjian Kinerja (PK) antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan tanggal 1 September 2021 yang merupakan revisi pasca refocusing PK tanggal 3 Mei 2021, bersama dengan surat ini kami menyampaikan perubahan Target dan Capaian Triwulan II pada aplikasi kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target Tahunan		Capaian Triwulan II		Justifikasi
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1.	Persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar (persen)	83%	84%	90,40%	65,73%	a. Target disesuaikan dengan Nota Dinas Nomor : M.158/DJPT/KP.560.S2/II/2021 perihal Pengukuran IKU Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Tahun 2021 yaitu 84%. b. Capaian pada triwulan II semula 90,40% merupakan capaian sebelum rata-rata. Setelah dihitung rata-rata dari capaian Triwulan I (41,05%) dan Triwulan II (90,40%) menjadi 65,73%.
2.	Indeks Profesionalitas Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)			58,91%	58,09%	Capaian IP ASN Dit.KAPI pada triwulan II semula 58,91% merupakan capaian IP ASN per 15 Juli 2021, kemudian disesuaikan untuk capaian IP ASN per 12 Juli yaitu 58,09%

Dengan dokumen pendukung sebagaimana terlampir

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

Direktur Kapal Perikanan dan Alat
Penangkapan Ikan



Ir. MANSUR, MM
NIP. 196603121991031002

Tembusan :
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Lampiran 1. Data Dukung Persentase Direktorat Kapal Perikanan Dan Alat Penangkapan Ikan Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar

- a. Nota Dinas dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : M.158/DJPT/KP.560.S2/II/2021 perihal Pengukuran IKU Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Tahun 2021

c. **Keaktifan (bobot 70%)**

- Pejabat Eselon II dan Pejabat Fungsional Tertentu (yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator dan Sub Koordinator) diharuskan melakukan posting keaktifan minimal **3 kali pada setiap triwulan**;
- Informasi yang disampaikan **harus** dilengkapi dengan foto atau video atau notulensi atau bahan paparan yang bersifat boleh dipublikasikan, dengan kriteria informasi narasi yang memenuhi unsur Apa, Dimana, Kapan, Siapa, Kenapa dan Bagaimana. (**5W1H = What, Where, When, Who, Why and How**);
- Informasi yang disampaikan juga dapat berupa jurnal, infografis, hasil penelitian dan *campaign* terkait Perikanan Tangkap.

3. Target tahun 2021 dan pertriwulan dengan rincian sebagai berikut:

TARGET			
TW I	TW II*	TW III**	TW IV***
84%	84%	84%	84%

Ket:

- * Rata-rata TW I + TW II
** Rata-rata TW I + TW II + TW III
*** Rata-rata TW I + TW II + TW III + TW IV

4. Penilaian hasil Manajemen Pengetahuan yang Terstandar level 2 dilakukan oleh **masing-masing level 2** dengan menghitung komponen Dokumen dan Keikutsertaan, sedangkan untuk komponen Keaktifan dilakukan oleh Pusdatin.
5. Untuk meningkatkan capaian kinerja indikator tersebut, agar dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Seluruh Pejabat Eselon II, Koordinator dan Sub Koordinator serta Pelaksana yang belum terdaftar di aplikasi Bitrix24 agar melakukan pendaftaran dengan memverifikasi undangan administrator bitrix24 yang terdapat pada email Saudara (daftar **terlampir**).
- b. Setelah terdaftar, Bapak/Ibu yang telah tergabung di aplikasi Bitrix24 diharapkan untuk aktif dalam membuat status terkait kegiatan yang berkaitan dengan unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
6. Untuk pembaharuan data dan informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan aplikasi Bitrix24 dapat menghubungi **Sdr. Jonathan Graydam** di nomor **+62 812-8168-0883**.
Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Yuliadi

Tembusan:
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSR E

b. Penilaian Indikator Manajemen Pengetahuan Terstandar Dit.KAPI Triwulan II

Penilaian IKU MP DIT. KAPI TW 2

Dokumen	Target	Capaian	%	Keaktifan	Target	Capaian	%
Perjanjian Kinerja	1	1	100,00	Level 2	3	3	100,00
Manual IKU	1	1	100,00	Koordinator	12	9	75,00
Laporan Kinerja	1	1	100,00	Sub Koordinator	27	23	85,19
TOTAL	3	3	100,00	TOTAL	42	35	86,73

Keikutsertaan	Target	Capaian	%	Komponen	Capaian	Bobot	%
Level 2	1	1	100,00	Dokumen	100,00	20	20,00
Level 3	4	4	100,00	Keikutsertaan	96,88	10	9,69
Level 4	9	9	100,00	Keaktifan	86,73	70	60,71
Staf	18	17	94,44	TOTAL			90,40
TOTAL	32	31	96,88				

TW I	41,05
TW II	90,40
Rata-rata	65,73

Lampiran 2. Data Dukung Indeks Profesionalitas Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

a. Capaian Indikator IP-ASN Dit.KAPI per 15 Juli 2021

IP-ASN 2021

Dashboard **Perikanan** Pegawai Monev IP-ASN

Filter: Cari Unit Kerja

Kembali ke halaman 1

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dibitung	Kualifikasi (Bobot 20)		Kompetensi (Bobot 40)		Kinerja (Bobot 30)		Disiplin (Bobot 10)		TOTAL	Keterangan
			IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase		
1	SEKRETARIAT DITJEN PERIKANAN TANGKAP	92	13,9	55,6 %	12,91	32,27 %	24,63	82,1 %	4,96	99,2 %	56,4	SANGAT RENDAH
2	DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN	54	15,2	60,8 %	25,14	62,85 %	24,81	82,7 %	5	100 %	70,16	RENDAH
3	DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN	63	15,16	60,64 %	13,05	34,63 %	25	83,33 %	4,9	98 %	58,91	SANGAT RENDAH
4	DIREKTORAT KEPSELUBUHAN PERIKANAN	53	15,77	63,08 %	9,29	23,22 %	25	83,33 %	4,85	97 %	54,92	SANGAT RENDAH
5	DIREKTORAT PERIZINAN DAN KEMELAYANAN	74	14,73	58,92 %	9,66	24,15 %	24,86	82,87 %	4,96	99,2 %	54,22	SANGAT RENDAH
6	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	79	14,13	56,52 %	19,24	48,1 %	25	83,33 %	4,92	98,4 %	63,29	RENDAH
7	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NEZAM ZACHMAN JAKARTA	51	11,88	47,52 %	24,71	61,78 %	23,96	79,87 %	4,88	97,6 %	65,43	RENDAH

b. Capaian Indikator IP-ASN Dit.KAPI per 12 Juli 2021

**IP ASN PER SATKER
LINGKUP DITJEN PERIKANAN TANGKAP**

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dibitung	Kualifikasi (Bobot 20)		Kompetensi (Bobot 40)		Kinerja (Bobot 30)		Disiplin (Bobot 10)		TOTAL	Keterangan
			IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase		
1	SEKRETARIAT DITJEN PERIKANAN TANGKAP	92	13,9	55,6 %	10,85	26,63 %	24,63	82,1 %	4,96	99,2 %	54,14	SANGAT RENDAH
2	DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN	54	15,2	60,8 %	23,19	57,96 %	24,81	82,7 %	5	100 %	69,21	RENDAH
3	DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN	62	15,06	60,32 %	13,1	32,75 %	25	83,33 %	4,9	98 %	59,01	SANGAT RENDAH
4	DIREKTORAT KEPSELUBUHAN PERIKANAN	53	15,77	63,08 %	8,54	21,35 %	25	83,33 %	4,86	97 %	54,16	SANGAT RENDAH
5	DIREKTORAT PERIZINAN DAN KEMELAYANAN	74	14,73	58,92 %	9,46	23,65 %	24,86	82,87 %	4,96	99,2 %	54,01	SANGAT RENDAH
6	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	79	14,13	56,52 %	19,24	48,1 %	25	83,33 %	4,92	98,4 %	63,29	RENDAH
7	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NEZAM ZACHMAN JAKARTA	52	12,04	48,18 %	24,71	61,78 %	23,96	79,83 %	4,88	97,6 %	65,62	RENDAH
8	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	62	12,74	50,95 %	20,4	51 %	23,1	77 %	5	100 %	61,24	RENDAH
9	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	58	9,29	37,16 %	22,87	56,68 %	25	83,33 %	4,9	98 %	61,86	RENDAH
10	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	43	11,07	44,29 %	25,17	62,03 %	25	83,33 %	4,91	98,2 %	66,15	RENDAH
11	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	51	11,41	45,84 %	25,05	62,03 %	25	83,33 %	4,9	98 %	66,20	RENDAH
12	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	31	13,66	54,2 %	19,71	46,77 %	25	83,33 %	5	100 %	62,29	RENDAH
13	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	41	10	40 %	20,85	52,15 %	25	83,33 %	5	100 %	60,85	SANGAT RENDAH

2.4. RENCANA KEGIATAN TAHUNAN

Untuk mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan melaksanakan kegiatan dan anggaran dengan rincian sebagaimana Tabel 4.

Tabel 4. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2021

No	Bidang/Kegiatan	Anggaran (Rp)
A	Bidang Kapal Perikanan	9.320.000.000
1.	Penyusunan/revisi pedoman kapal perikanan yang memenuhi standar laik tangkap dan laik simpan	862.350.000
a.	Penyusunan standar kapal non konvensional kapal perikanan (non convention vessel standart for fishing vessel)	307.550.000
b.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Laik Laut, Laik Tangkap dan Laik Simpan	195.450.000
c.	Penyiapan Pelaksanaan Kewenangan Pengukuran Kapal Perikanan dan Sertifikasi Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan	359.350.000
2.	Pelaksanaan pemeriksaan fisik kapal perikanan yang memenuhi standar laik tangkap dan laik simpan	1.737.650.000
a.	Bimbingan pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan yang Memenuhi Standar Laik Tangkap dan Laik Simpan	918.575.000
b.	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penilaian Pemeriksaan Fisik Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan yang Memenuhi Standar Laik Laut, Laik Tangkap, dan Laik Simpan	819.075.000
3.	Pelaksanaan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan nasional	334.300.000
a.	Evaluasi Implementasi Pendaftaran Kapal Perikanan	101.502.000
b.	Temu Koordinasi Pendaftaran Kapal Perikanan	466.898.000
c.	Pendukung Pelayanan Pendaftaran Kapal Perikanan	392.100.000
d.	Pembinaan Pendaftaran Kapal Perikanan Kewenangan Daerah	82.400.000
e.	Pengesahan Cape Town Agreement 2012	45.400.000
f.	Monitoring dan Evaluasi Pilot Project Penandaan Kapal Perikanan secara Elektronik	246.000.000
4.	Pelaksanaan persetujuan pengadaan kapal perikanan	385.700.000
a.	Pelaksanaan persetujuan pengadaan kapal perikanan	161.750.000
b.	Pembinaan Pelaksanaan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan Kewenangan Daerah	112.900.000
c.	Pembinaan Galangan Tradisional dalam Implementasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan	111.050.000
5.	Kapal perikanan bantuan yang disalurkan	5.000.000.000
	- Konsultan Perencana	50.000.000
	- Pembangunan kapal penangkap ikan ukuran 30 GT	2.600.000.000
	- Pembelian mesin untuk kapal penangkap ikan 30 GT	770.000.000
	- Pengiriman kapal penangkap ikan 30 GT	404.000.000
	- Alat Penangkapan Ikan	1.000.000.000
	- Biaya operasional sekali melaut	78.000.000
	- Biaya Pengurusan Dokumen Kapal (Surat Ukur, Grosse Akta, Surat Kelaikan. Kapal dan Pas Tahunan)	26.000.000
	- Perjalanan dinas dalam rangka cek progres, sea trial, dan serah terima	72.000.000
B	Bidang Alat Penangkapan Ikan	9.373.800.000
1.	Revisi kebijakan pengelolaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan	1.388.550.000
a.	Sosialisasi dan Koordinasi Kebijakan API	731.050.000
b.	Program Nasional Penyusunan Standar (PNPS)/ Kaji Ulang	501.500.000
c.	Kaji Ulang SNI	156.000.000
2.	Pengumpulan, pengolahan, dan analisa data alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan	1.526.450.000
a.	Pemetaan Jalur Penangkapan dan Penempatan API/ABPI	646.050.000

No	Bidang/Kegiatan	Anggaran (Rp)
b.	Kajian Selektivitas dan Kapasitas API	624.690.000
c.	Pengumpulan Data Sebaran API	63.760.000
c.	Konsensus Bahan Standar API	191.950.000
3.	Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang disalurkan	6.458.800.000
a.	- Pengadaan dan penyaluran bantuan alat penangkapan ikan	6.000.000.000
	- Dukungan Penyaluran Bantuan API	458.800.000
C	Bidang Pengawasan Kapal Perikanan	3.385.000.000
1.	Penyusunan/reviu pedoman seleksi dan penetapan lembaga/instruktur pelaksana sertifikasi awak kapal perikanan dan pedoman sertifikasi awak kapal perikanan	1.643.000.000
a.	Sertifikasi Awak Kapal Perikanan Laik Simpan dan Laik Tangkap	520.744.000
b.	Penyusunan Standar Pengawasan Kapal Perikanan	321.800.000
c.	Pelaksanaan screening lembaga pelaksana sertifikasi	237.588.000
d.	Bimtek Training of trainer sertifikasi layak tangkap dan layak simpan	239.850.000
e.	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan	107.518.000
f.	Koordinasi dan Kerjasama dengan Instansi Terkait Bidang Sertifikasi Awak Kapal Perikanan	215.500.000
2.	Pelaksanaan penerapan Perjanjian Kerja Laut	1.742.000.000
a.	Penyusunan Penerapan perjanjian Kerja laut	302.975.000
b.	Monitoring dan Evaluasi penerapan PKL bagi awak kapal perikanan	79.920.000
c.	Sertifikasi HAM Perikanan pada Usaha Perikanan Tangkap	108.200.000
d.	Pendataan dan Pemenuhan Dokumen Awak Kapal Perikanan	104.754.000
e.	Pendataan Serikat Pekerja dan Perusahaan Penempatan Awak Kapal Perikanan	130.495.000
f.	Implementasi Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan	537.220.000
g.	Rekomendasi Teknis Perusahaan Penempatan Awak Kapal Perikanan	78.626.000
h.	Penanganan Pengaduan Awak Kapal Perikanan	95.800.000
i.	Koordinasi dan Kerjasama dengan Instansi Terkait Bidang Perlindungan Awak Kapal Perikanan	304.010.000
D	Bidang Permesinan dan Operasional Kapal Perikanan	4.625.000.000
1.	Pengumpulan dan analisis data produktivitas kapal perikanan	1.004.280.000
a.	Penyusunan Data Nilai Produktivitas	632.505.000
b.	Pleno Pengumpulan data Produktivitas	204.475.000
c.	Sosialisasi Data produktivitas Kapal Perikanan	167.300.000
2.	Penyusunan/reviu pedoman pemantauan dan standarisasi permesinan kapal perikanan serta penggunaan bahan bakar untuk mesin kapal perikanan	672.150.000
a.	Penyiapan Bahan Kebijakan BBM Bersubsidi	391.750.000
b.	Rapat Pleno Penyiapan Bahan Kebijakan BBM Bersubsidi	280.400.000
3.	Supervisi dan evaluasi peningkatan pengetahuan/kompetensi nelayan dibidang permesinan	535.250.000
a.	Pelayanan Permesinan di Sentra Nelayan (Service Campaign)	535.250.000
4.	Pelaporan hasil identifikasi operasionalisasi bantuan sarana penangkapan ikan	1.304.120.000
a.	Pemantauan dan Evaluasi Operasional Kapal Bantuan Tahun 2015-2019	893.930.000
b.	Pertemuan Pleno Evaluasi Kapal Perikanan Bantuan Tahun 2015-2019	410.190.000
5.	Tata kelola kelembagaan dan operasional SKPT Saumlaki yang mandiri	1.109.200.000
a.	Pendampingan dan Monitoring	1.109.200.000
	Jumlah	26.703.800.000

Pasca Refocusing Anggaran Tahap IV tanggal 1 September 2021 jumlah anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2021 berkurang dari Rp26.703.800.000 menjadi Rp14.433.332.000 dengan rincian kegiatan pada Tabel 5.

Tabel 5. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2021 Pasca Refocusing Tahap IV

KODE	URAIAN KEGIATAN	PAGU
2337	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	14.433.332.000
I	Bidang Kapal Perikanan	2.330.382.000
A	Penyusunan standar kapal non konvensi kapal perikanan (non convention vessel standart for fishing vessel)	66.477.000
B	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Laik Laut, Laik Tangkap dan Laik Simpan	161.178.000
C	Penyiapan Pelaksanaan Kewenangan Pengukuran Kapal Perikanan dan Sertifikasi Kelaikan dan Pengawakan Kapal	54.320.000
A	Bimbingan pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan yang Memenuhi Standar Laik Tangkap dan Laik Simpan	218.196.000
B	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penilaian Pemeriksaan Fisik Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan yang Memenuhi	497.939.000
A	Evaluasi Implementasi Pendaftaran Kapal Perikanan	277.845.000
B	Temu Koordinasi Pendaftaran Kapal Perikanan	452.623.000
C	Pendukung Pelayanan Pendaftaran Kapal Perikanan	71.657.000
D	Pembinaan Pendaftaran Kapal Perikanan Kewenangan Daerah	1.200.000
F	Monitoring dan Evaluasi Pilot Project Penandaan Kapal Perikanan secara Elektronik	239.398.000
A	Pelaksanaan persetujuan pengadaan kapal perikanan	122.801.000
A	Pembinaan Pelaksanaan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan Kewenangan Daerah	20.641.000
B	Pembinaan Galangan Tradisional dalam Implementasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan	10.102.000
C	Bimtek Marine Inspector	105.630.000
B	Pendukung Pembangunan Kapal Perikanan	30.375.000
II	Bidang Alat Penangkapan Ikan	7.861.182.000
A	Sosialisasi dan Koordinasi Kebijakan API	649.200.000
B	Program Nasional Penyusunan Standar (PNPS)/ Kaji Ulang	44.970.000
A	Pemetaan Jalur Penangkapan dan Penempatan API/ABPI	343.886.000
B	Kajian Selektivitas dan Kapasitas API	394.237.000
A	Konsensus Bahan Standar API	37.184.000
A	Pengadaan Paket Bantuan API	6.000.000.000
B	Dukungan Penyaluran Bantuan API	391.705.000
III	Bidang Awak Kapal Perikanan	1.448.383.000
A	Sertifikasi Awak Kapal Perikanan Laik Simpan dan Laik Tangkap	109.865.000
B	Penyusunan Standar Pengawakan Kapal Perikanan	173.746.000
F	Koordinasi dan Kerjasama dengan Instansi Terkait Bidang Sertifikasi Awak Kapal Perikanan	78.225.000
A	Penyusunan Penerapan perjanjian Kerja laut	220.590.000
B	Monitoring dan Evaluasi penerapan PKL bagi awak kapal perikanan	6.205.000
F	Implementasi Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan	329.300.000
G	Sertifikasi Calon Anggota Komite Pengesahan Program Diklat Awak Kapal Perikanan	193.578.000

KODE	URAIAN KEGIATAN	PAGU
H	Sertifikasi Calon Anggota Dewan Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan	165.000.000
H	Penanganan Pengaduan Awak Kapal Perikanan	33.132.000
I	Koordinasi dan Kerjasama dengan Instansi Terkait Bidang Perlindungan Awak Kapal Perikanan	138.742.000
IV	Bidang Permesinan dan Operasional Kapal Perikanan	2.793.385.000
A	Penyusunan Data Nilai Produktivitas	278.382.000
B	Pleno Pengumpulan data Produktivitas	50.657.000
A	Penyiapan Bahan Kebijakan BBM Bersubsidi	33.970.000
A	Pelayanan Permesinan di Sentra Nelayan (Service Campaign)	398.076.000
A	Pemantauan dan Evaluasi Operasional Kapal Bantuan Tahun 2015-2019	836.000.000
B	Pertemuan Pleno Evaluasi Kapal Perikanan Bantuan Tahun 2015-2019	397.290.000
A	Pendampingan dan Monitoring	799.010.000

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 :

Bulan : **Desember**

Kode	Uraian [register - Beban - jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	63.606.752.000	62.912.817.179	693.934.821
2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal	14.433.332.000	14.425.538.308	7.793.692
2337.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	1.832.486.000	1.829.496.305	2.989.695
2337.ABR.001	Data produktivitas kapal perikanan yang dihitung dan dianalisis	329.039.000	326.966.962	2.072.038
051	Pengumpulan dan analisis data produktivitas kapal perikanan	329.039.000	326.966.962	2.072.038
A	<u>Penyusunan Data Nilai Produktivitas</u>	284.082.000	282.356.962	1.725.038
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	28.917.000	28.891.626	25.374
521219	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	45.750.000	45.699.250	50.750
522131	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Jasa Konsultan	50.000.000	49.252.000	748.000
522151	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Jasa Profesi	4.500.000	3.600.000	900.000
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	154.915.000	154.914.086	914
B	<u>Pleno Pengumpulan data Produktivitas</u>	44.957.000	44.610.000	347.000
524119	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	44.957.000	44.610.000	347.000
2337.ABR.003	Rekomendasi kebijakan pengelolaan alat penangkapan ikan dan alat bantu	1.469.477.000	1.468.759.343	717.657
051	Reviu kebijakan pengelolaan alat penangkapan ikan dan alat bantu	738.495.000	738.165.050	329.950
A	<u>Sosialisasi dan Koordinasi Kebijakan API</u>	696.031.000	695.701.050	329.950
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	130.531.000	130.530.950	50
521213	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Honor Output Kegiatan	1.000.000	1.000.000	0
522192	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	39.000.000	39.000.000	0
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	506.000.000	505.670.100	329.900
524114	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	19.500.000	19.500.000	0
B	<u>Program Nasional Penyusunan Standar (PNPS) / Kaji Ulang</u>	42.464.000	42.464.000	0
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	16.364.000	16.364.000	0
522151	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Jasa Profesi	26.100.000	26.100.000	0
052	Pengumpulan, pengolahan, dan analisa data alat penangkapan ikan dan alat	693.798.000	693.410.293	387.707
A	<u>Pemetaan Jalur Penangkapan dan Penempatan API/ABPI</u>	320.664.000	320.266.320	367.680
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	8.664.000	8.664.000	0
522151	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Jasa Profesi	13.500.000	13.500.000	0
524119	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	63.500.000	63.500.000	0
532111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Modal Peralatan dan Mesin	235.000.000	234.632.320	367.680
B	<u>Kajian Selektivitas dan Kapasitas API</u>	373.134.000	373.113.973	20.027
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	4.314.000	4.313.973	27
522151	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Jasa Profesi	1.800.000	1.800.000	0
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	367.020.000	367.000.000	20.000
053	Penyusunan bahan kebijakan alat penangkapan ikan dan alat bantu	37.184.000	37.184.000	0
A	<u>Konsensus Bahan Standar API</u>	37.184.000	37.184.000	0
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	10.184.000	10.184.000	0
522151	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Jasa Profesi	27.000.000	27.000.000	0
2337.ABR.004	Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan	33.970.000	33.770.000	200.000
051	Penyusunan/reviu pedoman pemantauan dan standarisasi permesinan kapal	33.970.000	33.770.000	200.000
A	<u>Penyiapan Bahan Kebijakan BBM Bersubsidi</u>	33.970.000	33.770.000	200.000
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	4.970.000	4.970.000	0
522151	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Jasa Profesi	29.000.000	28.800.000	200.000
2337.ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	720.414.000	719.696.951	717.049
2337.ADI.001	Awak kapal perikanan yang disertifikasi (PEN)	720.414.000	719.696.951	717.049
051	Penyusunan/reviu pedoman seleksi dan penetapan lembaga/instruktur	720.414.000	719.696.951	717.049
A	<u>Sertifikasi Awak Kapal Perikanan Laik Simpan dan Laik Tangkap</u>	196.822.000	196.659.400	162.600
521119	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Barang Operasional Lainnya	1.900.000	1.900.000	0
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	108.632.000	108.575.400	56.600
521213	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Honor Output Kegiatan	1.450.000	1.450.000	0
522151	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Jasa Profesi	3.600.000	3.600.000	0
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	64.450.000	64.384.000	66.000
524119	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	16.790.000	16.750.000	40.000
B	<u>Penyusunan Standar Pengawakan Kapal Perikanan</u>	65.767.000	65.676.000	91.000
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	12.367.000	12.367.000	0
521213	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Honor Output Kegiatan	40.900.000	40.890.000	10.000
522151	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Jasa Profesi	6.800.000	6.800.000	0
522192	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	5.700.000	5.619.000	81.000
F	<u>Koordinasi dan Kerjasama dengan Instansi Terkait Bidang Sertifikasi Awak Kapal</u>	377.825.000	377.361.551	463.449
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	8.625.000	8.616.000	9.000
522192	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	7.500.000	7.324.000	176.000
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	360.800.000	360.701.551	98.449
524113	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000	720.000	180.000
H	<u>Sertifikasi Calon Anggota Dewan Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan</u>	80.000.000	80.000.000	0
521219	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	80.000.000	80.000.000	0
2337.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	2.300.007.000	2.299.062.111	944.889

= Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]

Kode	Uraian [register - Beban - jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
2337.BAH.001	Kapal perikanan yang memenuhi standar laik tangkap dan laik simpan	998.110.000	998.039.705	70.295
051	Penyusunan/reviu pedoman kapal perikanan yang memenuhi standar laik	285.427.000	285.425.355	1.645
A	Penyusunan standar kapal non konvensi kapal perikanan (non convention	66.479.000	66.477.355	1.645
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	10.490.000	10.489.155	845
522192	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	6.950.000	6.950.000	0
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	47.909.000	47.908.200	800
524119	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.130.000	1.130.000	0
B	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Laik Laut, Laik Tangkap	164.628.000	164.628.000	0
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	6.950.000	6.950.000	0
524119	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	157.678.000	157.678.000	0
C	Penyiapan Pelaksanaan Kewenangan Pengukuran Kapal Perikanan dan	54.320.000	54.320.000	0
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	5.300.000	5.300.000	0
524119	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	49.020.000	49.020.000	0
053	Pelaksanaan pemeriksaan fisik kapal perikanan yang memenuhi standar laik	712.683.000	712.614.350	68.650
A	Bimbingan pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan yang Memenuhi Standar Laik	103.289.000	103.220.350	68.650
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	2.364.000	2.365.350	68.650
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100.925.000	100.925.000	0
B	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penilaian Pemeriksaan Fisik Kapal Penangkap	609.394.000	609.394.000	0
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	609.394.000	609.394.000	0
2337.BAH.002	Kapal perikanan yang terdaftar	1.042.723.000	1.042.033.000	690.000
052	Pelaksanaan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan nasional	1.042.723.000	1.042.033.000	690.000
A	Evaluasi Implementasi Pendaftaran Kapal Perikanan	321.577.000	321.274.700	302.300
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	6.876.000	6.876.000	0
522151	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Jasa Profesi	45.900.000	45.900.000	0
522192	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	15.000.000	14.980.000	20.000
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	253.801.000	253.518.700	282.300
B	Temu Koordinasi Pendaftaran Kapal Perikanan	452.588.000	452.588.000	0
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	27.850.000	27.850.000	0
521213	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Honor Output Kegiatan	2.350.000	2.350.000	0
522151	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Jasa Profesi	4.800.000	4.800.000	0
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	98.898.000	98.898.000	0
524119	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	318.690.000	318.690.000	0
C	Pendukung Pelayanan Pendaftaran Kapal Perikanan	117.958.000	117.855.300	102.700
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	26.800.000	26.697.800	102.200
522151	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Jasa Profesi	74.700.000	74.700.000	0
522192	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	16.458.000	16.457.500	500
D	Pembinaan Pendaftaran Kapal Perikanan Kewenangan Daerah	1.200.000	1.200.000	0
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	1.200.000	1.200.000	0
F	Monitoring dan Evaluasi Pilot Project Penandaan Kapal Perikanan secara	149.400.000	149.115.000	285.000
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	9.800.000	9.800.000	0
532111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Modal Peralatan dan Mesin	139.600.000	139.315.000	285.000
2337.BAH.003	Persetujuan pengadaan kapal perikanan yang memenuhi ketentuan	259.174.000	258.989.406	184.594
052	Pelaksanaan persetujuan pengadaan kapal perikanan	122.467.000	122.449.625	17.375
A	Pelaksanaan persetujuan pengadaan kapal perikanan	122.467.000	122.449.625	17.375
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	7.476.000	7.475.000	1.000
522151	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Jasa Profesi	45.565.000	45.549.000	16.000
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	69.426.000	69.425.625	375
053	Evaluasi pelaksanaan persetujuan pengadaan kapal perikanan	136.707.000	136.539.781	167.219
A	Pembinaan Pelaksanaan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan Kewenangan	20.642.000	20.640.120	1.880
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	3.650.000	3.649.000	1.000
522192	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	550.000	550.000	0
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.442.000	16.441.120	880
B	Pembinaan Galangan Tradisional dalam Implementasi Persetujuan Pengadaan	12.065.000	12.064.900	100
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	1.962.000	1.962.000	0
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.103.000	10.102.900	100
C	Dukungan Layanan Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan	104.000.000	103.834.761	165.239
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	2.000.000	1.850.000	150.000
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	102.000.000	101.984.761	15.239
2337.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1.128.045.000	1.124.234.036	1.810.964
2337.BDC.001	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya	398.076.000	397.752.250	323.750
053	Supervisi dan evaluasi peningkatan pengetahuan/kompetensi nelayan	398.076.000	397.752.250	323.750
A	Pelayanan Pemesinan di Sentra Nelayan (Service Campaign)	398.076.000	397.752.250	323.750
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	145.776.000	145.764.250	11.750
521213	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Honor Output Kegiatan	4.400.000	4.350.000	50.000
521219	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	14.600.000	14.584.000	16.000
522151	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Jasa Profesi	2.700.000	2.700.000	0
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	230.600.000	230.354.000	246.000
2337.BDC.002	Pelaku usaha dan awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian	727.969.000	726.481.786	1.487.214
052	Pelaksanaan penerapan Perjanjian Kerja Laut	727.969.000	726.481.786	1.487.214
A	Penyusunan Penerapan perjanjian Kerja laut	220.590.000	219.910.189	679.811
521119	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Barang Operasional Lainnya	2.800.000	2.760.482	39.518

= Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]

Kode	Uraian [register - Beban - jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	31.050.000	31.023.550	26.450
521213	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Honor Output Kegiatan	5.800.000	5.800.000	0
522151	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Jasa Profesi	32.200.000	31.800.000	400.000
522192	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	10.000.000	9.984.000	16.000
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	96.400.000	96.202.157	197.843
524119	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	42.340.000	42.340.000	0
B	<u>Monitoring dan Evaluasi penerapan PKL bagi awak kapal perikanan</u>	1.855.000	1.851.000	4.000
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	1.855.000	1.851.000	4.000
F	<u>Implementasi Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan</u>	386.400.000	385.997.224	402.776
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	56.850.000	56.849.915	85
521213	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Honor Output Kegiatan	11.600.000	11.600.000	0
522151	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Jasa Profesi	9.900.000	9.500.000	400.000
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	239.800.000	239.797.309	2.691
524119	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	68.250.000	68.250.000	0
H	<u>Penanganan Pengaduan Awak Kapal Perikanan</u>	2.492.000	2.481.000	11.000
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	2.492.000	2.481.000	11.000
I	<u>Koordinasi dan Kerjasama dengan Instansi Terkait Bidang Perlindungan Awak</u>	116.632.000	116.242.373	389.627
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	6.909.000	6.909.000	0
522192	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	6.500.000	6.224.000	276.000
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	75.390.000	75.326.813	63.187
524113	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.600.000	2.550.000	50.000
524119	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	25.233.000	25.232.560	440
2337.BKB	Pemantauan produk	1.233.290.000	1.233.107.980	182.020
2337.BKB.001	Bantuan sarana penangkapan ikan yang diidentifikasi dan dipantau	1.233.290.000	1.233.107.980	182.020
052	Pelaporan hasil identifikasi operasionalisasi bantuan sarana penangkapan	1.233.290.000	1.233.107.980	182.020
A	<u>Pemantauan dan Evaluasi Operasional Kapal Bantuan Tahun 2015-2019</u>	836.000.000	835.819.980	180.020
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	85.500.000	85.463.500	36.500
521219	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	27.500.000	27.480.500	19.500
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	723.000.000	722.875.980	124.020
B	<u>Pertemuan Pleno Evaluasi Kapal Perikanan Bantuan Tahun 2015-2019</u>	397.290.000	397.288.000	2.000
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	19.120.000	19.120.000	0
524119	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	378.170.000	378.168.000	2.000
2337.QEG	Bantuan Peralatan / Sarana	6.422.080.000	6.421.385.025	694.975
2337.QEG.001	Kapal perikanan bantuan yang disalurkan (PEN)	30.375.000	30.373.600	1.400
052	Pelaksanaan bantuan kapal perikanan	30.375.000	30.373.600	1.400
B	<u>Pendukung Pembangunan Kapal Perikanan</u>	30.375.000	30.373.600	1.400
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.375.000	30.373.600	1.400
2337.QEG.002	Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang	6.391.705.000	6.391.011.425	693.575
052	Pelaksanaan bantuan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan	6.391.705.000	6.391.011.425	693.575
A	<u>Pengadaan Paket Bantuan API</u>	6.000.000.000	5.999.307.325	692.675
526112	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan	6.000.000.000	5.999.307.325	692.675
B	<u>Dukungan Penyaluran Bantuan API</u>	391.705.000	391.704.100	900
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	18.908.000	18.908.000	0
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	289.247.000	289.246.100	900
524119	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	83.550.000	83.550.000	0
2337.QGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	799.010.000	798.555.900	454.100
2337.QGA.001	Tata kelola kelembagaan dan operasional SKPT Saumlaki yang mandiri	799.010.000	798.555.900	454.100
054	Monitoring dan evaluasi SKPT	799.010.000	798.555.900	454.100
A	<u>Pendampingan dan Monitoring</u>	799.010.000	798.555.900	454.100
521211	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Bahan	54.610.000	54.544.100	65.900
521213	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Honor Output Kegiatan	50.400.000	50.400.000	0
521219	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	12.500.000	12.462.000	38.000
522131	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Jasa Konsultan	48.000.000	48.000.000	0
522151	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Jasa Profesi	14.000.000	13.800.000	200.000
524111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	499.500.000	499.357.300	142.700
524119	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	84.000.000	83.992.500	7.500
532111	[00000000-A-0-0-175-01-00] Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.000.000	36.000.000	0

2.5. PENETAPAN KINERJA

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2021 memiliki 4 (empat) Sasaran Kegiatan dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 3519070 (EXT:1239), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM: <https://kkp.go.id/djpt>, SURAT ELEKTRONIK: djpt@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Goenaryo**

Jabatan : Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Muhammad Zaini**

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal PerikananTangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Januari 2021

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Pihak Pertama
Direktur Kapal Perikanan dan Alat
Penangkapan Ikan


Muhammad Zaini


Goenaryo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Pengelolaan sarana perikanan tangkap yang berdaya saing	1	Jumlah kapal perikanan yang terbangun, terstandarisasi, terdaftar dan/atau yang memenuhi ketentuan (unit)	6.760
		2	Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan memenuhi ketentuan (unit)	750
		3	Persentase mesin dan kapal perikanan yang dihitung produktivitasnya dan terpantau operasionalnya (persen)	100
2.	Pengelolaan awak kapal perikanan yang berdaya saing	4	Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi (orang)	15.000
3.	Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri	5	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki (tingkat kemandirian 1-5)	4
4.	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	6	Indeks Profesionalitas Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	73
		7	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	85,15
		8	Persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar (persen)	83
		9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	65
		10	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	72,5
11	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	72,5		

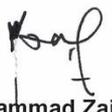
Kegiatan : Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawasan Kapal Perikanan

Anggaran Tahun 2021 : Rp.29,960,000,000,-

Jakarta, 14 Januari 2021

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Pihak Pertama
Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan


Muhammad Zaini


Goenaryo

Kemudian Revisi Pertama :



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 3519070 (EXT:1239), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM: <https://kkp.go.id/djpt>, SURAT ELEKTRONIK: djpt@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Trian Yunanda**

Jabatan : Plt. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Muhammad Zaini**

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

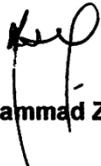
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 Mei 2021

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Muhammad Zaini

Pihak Pertama
Plt. Direktur Kapal Perikanan dan
Alat Penangkapan Ikan


Trian Yunanda

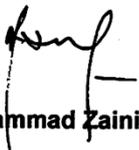
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Pengelolaan sarana perikanan tangkap yang berdaya saing	1	Jumlah kapal perikanan yang terbangun, terstandarisasi, terdaftar dan/atau yang memenuhi ketentuan (unit)	3.400
		2	Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan memenuhi ketentuan (unit)	12.000
		3	Persentase mesin dan kapal perikanan yang dihitung produktivitasnya dan terpantau operasionalnya (persen)	100
2.	Pengelolaan awak kapal perikanan yang berdaya saing	4	Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi (orang)	15.000
3.	Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri	5	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki (tingkat kemandirian 1-5)	4
4.	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	6	Indeks Profesionalitas Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	73
		7	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	85,15
		8	Persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar (persen)	83
		9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	65
		10	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	72,5
		11	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	72,5

Program : Pengelolaan Kelautan dan Perikanan
Anggaran Tahun 2021 : Rp. 26.703.800.000,-

Jakarta, 3 Mei 2021

Pihak Kedua
 Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Muhammad Zaini

Pihak Pertama
 Plt. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan


Triah Yunanda

Kemudian Pasca Refocusing Anggaran Tahapan IV :



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 3519070 (EXT:1239), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAN: <https://kkp.go.id/djpt>, SURAT ELEKTRONIK: djpt@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mansur**

Jabatan : Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Muhammad Zaini**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

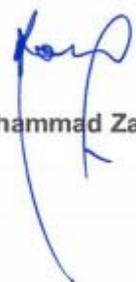
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 September 2021

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Pihak Pertama
Direktur Kapal Perikanan dan Alat
Penangkapan Ikan


Muhammad Zaini


Mansur

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Pengelolaan sarana perikanan tangkap yang berdaya saing	1	Jumlah kapal perikanan yang terbangun, terstandarisasi, terdaftar dan/atau yang memenuhi ketentuan (unit)	3.400
		2	Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan memenuhi ketentuan (unit)	12.000
		3	Persentase mesin dan kapal perikanan yang dihitung produktivitasnya dan terpantau operasionalnya (persen)	100
2.	Pengelolaan awak kapal perikanan yang berdaya saing	4	Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi (orang)	15.000
3.	Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri	5	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki (tingkat kemandirian 1-5)	4
4.	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	6	Indeks Profesionalitas Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	73
		7	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	85,15
		8	Persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar (persen)	84
		9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	65
		10	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	72,5
		11	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	72,5

Program : Pengelolaan Kelautan dan Perikanan

Anggaran Tahun 2021 : Rp. 14.433.332.000,-

Jakarta, 1 September 2021

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Muhammad Zaini

Pihak Pertama
Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Mansur

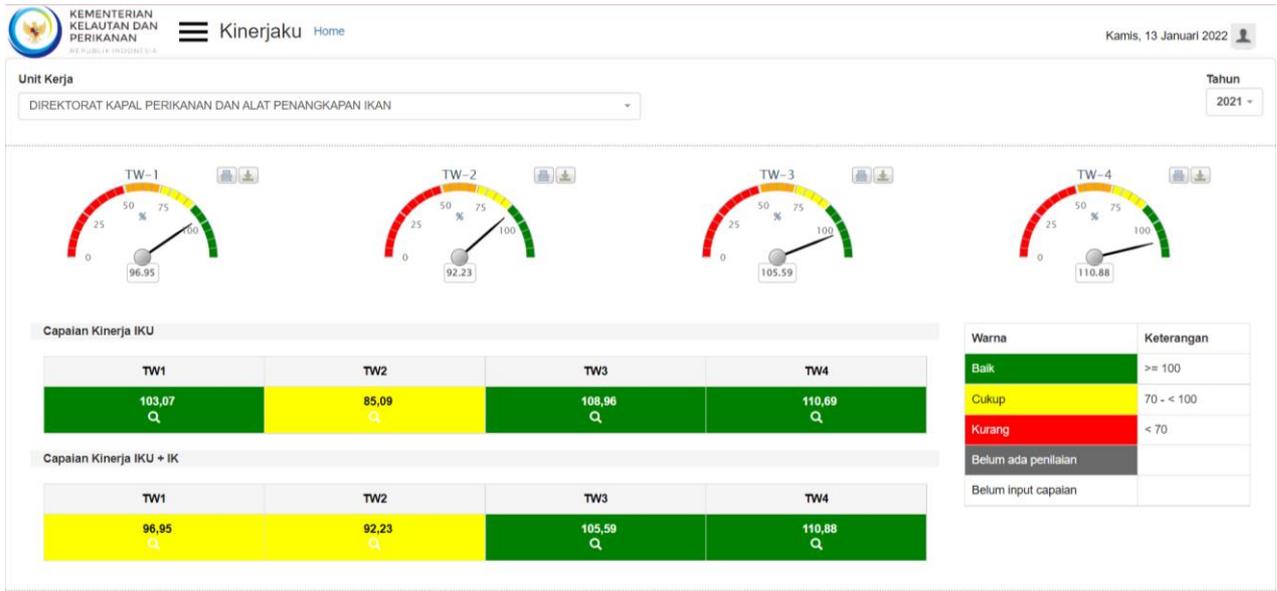
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan pada tahun 2021 telah menetapkan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu kepada Balanced Scorecard (BSC). Akuntabilitas kinerja diwujudkan melalui pencapaian 4 sasaran kegiatan dan 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang telah diinput ke dalam aplikasi KINERJAKU. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2021 disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Target Tahunan	Capaian Tahunan	%
1.	Pengelolaan sarana perikanan tangkap yang berdaya saing			
1.	Jumlah kapal perikanan yang terbangun, terstandarisasi, terdaftar dan/atau yang memenuhi ketentuan (unit)	3.400	5.772	169,76
2.	Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan memenuhi ketentuan (unit)	12.000	12.525	104,4
3.	Persentase mesin dan kapal perikanan yang dihitung produktivitasnya dan terpantau operasionalnya (persen)	100	111,88	111,88
2.	Pengelolaan awak kapal perikanan yang berdaya saing			
4.	Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi (orang)	15.000	89.550	597
3.	Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri			
5.	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki (tingkat kemandirian 1-5)	4	4	100
4.	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan			
6.	Indeks Profesionalitas Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	73	78,45	107,46
7.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	85,15	85,56	100,48
8.	Persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar (persen)	84	79,94	95,16
9.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	65	100	153,84
10.	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	72,5	95,51	131,73
11.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	72,5	80	110,34

Capaian Dit.KAPI Tahun 2021 pada Aplikasi Kinerjaaku :



Raport Kinerja Desember - 2021

Ura: Naga: DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN

Skor Kinerja: 110.88

NO	SABARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	POLARISASI	TW-1		TW-2		TW-3		TW-4		RATA-RATA		
						TG	CP									
1	Pengabdian secara perlahan langkah yang berbeda setiap	BSKJ.01.01	Jumlah kapal perikanan yang terbagun, berkolaborasi, berkolaborasi yang memenuhi ketentuan (smp) Dashboard (https://inerja.ku.kapal.perikanan.go.id/2021/12/31)	unit	Maksimal	1.100,00	0,00	1.670,00	2.000,00	1.670,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	Pengabdian secara perlahan langkah yang berbeda setiap	BSKJ.01.02	Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbagun dan memenuhi ketentuan (smp) Dashboard (https://inerja.ku.kapal.perikanan.go.id/2021/12/31)	unit	Maksimal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3	Pengabdian secara perlahan langkah yang berbeda setiap	BSKJ.01.03	Persentase mesin dan kapal perikanan yang dioperasikan dan siap untuk beroperasi (smp) Dashboard (https://inerja.ku.kapal.perikanan.go.id/2021/12/31)	persen	Maksimal	40,00	40,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
4	Pengabdian secara perlahan langkah yang berbeda setiap	BSKJ.02.04	Jumlah awak kapal perikanan yang bersertifikasi (smp) Dashboard (https://inerja.ku.kapal.perikanan.go.id/2021/12/31)	orang	Maksimal	11.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5	Pengabdian secara perlahan dan Perikanan Terpadu (SMP) yang memadai	BSKJ.03.01	Tingkat Kemandirian Sektor Kelautan dan Perikanan Terpadu (SMP) Sumbida (smp) Dashboard (https://inerja.ku.kapal.perikanan.go.id/2021/12/31)	Skala Kemandirian 1-5	Maksimal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00
6	Tata laksana pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	BSKJ.04.01	Indeks Profesionalitas Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (smp) Dashboard (https://inerja.ku.kapal.perikanan.go.id/2021/12/31)	Indeks	Maksimal	0,00	0,00	60,00	58,31	65,00	58,31	60,00	60,00	58,29	73,00	78,45
7	Tata laksana pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	BSKJ.04.02	Mata Riset dan Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (smp) Dashboard (https://inerja.ku.kapal.perikanan.go.id/2021/12/31)	IKM	Maksimal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15	85,15	85,15
8	Tata laksana pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	BSKJ.04.03	Persentase Diseminasi Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menggunakan sistem manajemen pengetahuan terpadu (smp) Dashboard (https://inerja.ku.kapal.perikanan.go.id/2021/12/31)	persen	Maksimal	84,00	41,01	84,00	84,40	84,00	67,73	84,00	73,26	84,00	69,24	84,00
9	Tata laksana pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	BSKJ.04.04	Persentase Realisasi Hasil Pengukuran yang Dihasilkan untuk Peningkatan Kinerja (smp) Dashboard (https://inerja.ku.kapal.perikanan.go.id/2021/12/31)	persen	Maksimal	60,00	100,00	60,00	100,00	60,00	100,00	60,00	100,00	60,00	100,00	60,00
10	Tata laksana pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	BSKJ.04.10	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan pemantauan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (smp) Dashboard (https://inerja.ku.kapal.perikanan.go.id/2021/12/31)	persen	Maksimal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	95,11	
11	Tata laksana pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	BSKJ.04.11	Tingkat Kapasitas Pengabdian BTKI Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (smp) Dashboard (https://inerja.ku.kapal.perikanan.go.id/2021/12/31)	persen	Maksimal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	80,00	

Tutup (https://inerja.ku.kapal.perikanan.go.id/home)

3.1. Sasaran Kegiatan (SK-1) : Pengelolaan sarana perikanan tangkap yang berdaya saing

3.1.1. IKU.01. Jumlah kapal perikanan yang terstandarisasi, terdaftar dan/atau yang memenuhi ketentuan (unit)

Merupakan indikator yang menunjukkan hasil rekapitulasi antara kapal perikanan bantuan yang terbangun dan terstandar serta kapal perikanan yang terdaftar. Formula perhitungannya capaiannya adalah:

- Menghitung jumlah kapal perikanan yang terdaftar sebagai kapal perikanan;
- Menghitung jumlah usulan pengadaan kapal dan;
- Menghitung jumlah kapal yang telah dilakukan cek fisik

Jumlah Kapal Perikanan Yang Terbangun, Terstandarisasi, Terdaftar Dan / Atau Yang Memenuhi Ketentuan (unit) Tahun 2021 disajikan pada tabel 7.

Tabel 7. Capaian jumlah kapal perikanan yang terbangun, terstandarisasi, terdaftar dan / atau yang memenuhi ketentuan Tahun 2021

No	Komponen Indikator Kinerja	TW I	TW II	TW III	TW IV	Jumlah
1.	Kapal Perikanan yang telah disetujui Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan	143	135	162	1.004	1.444
2.	Penerbitan Buku Kapal Perikanan	465	393	399	1.048	2.305
3	Penerbitan Laporan Cek Fisik (Aplikasi SICEFI online : 1.555, Permohonan Manual offline : 468)	509	450	287	309	2.023
Capaian		1.117	978	848	2.361	5.772

Capaian jumlah kapal perikanan yang terbangun, terstandarisasi, terdaftar dan / atau yang memenuhi ketentuan Tahun 2021 sebesar 5.772 mengalami penurunan lebih jauh dari capaian tahun 2020 yaitu sebesar 20.630. Hal ini terutama disebabkan target dan capaian 2020 termasuk Buku Kapal Perikanan yang diterbitkan oleh daerah. Pada tahun 2021 Penerbitan Buku Kapal Perikanan tidak termasuk daerah dikarenakan refocusing anggaran.

a. Kapal Perikanan yang telah disetujui Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan

Persetujuan pengadaan kapal perikanan merupakan surat yang diberikan kepada pemilik kapal yang telah mendapatkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk membangun dan memodifikasi kapal perikanan. Mekanisme pelayanan dilakukan secara daring (online) melalui aplikasi Sistem Informasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (SIKAPI). Adapun realisasi output pendaftaran kapal perikanan sebanyak 1.444 layanan (962,66%) dari target sebanyak 150 layanan. Jumlah persetujuan pengadaan kapal perikanan pada Tahun 2021 disajikan pada Tabel 8.

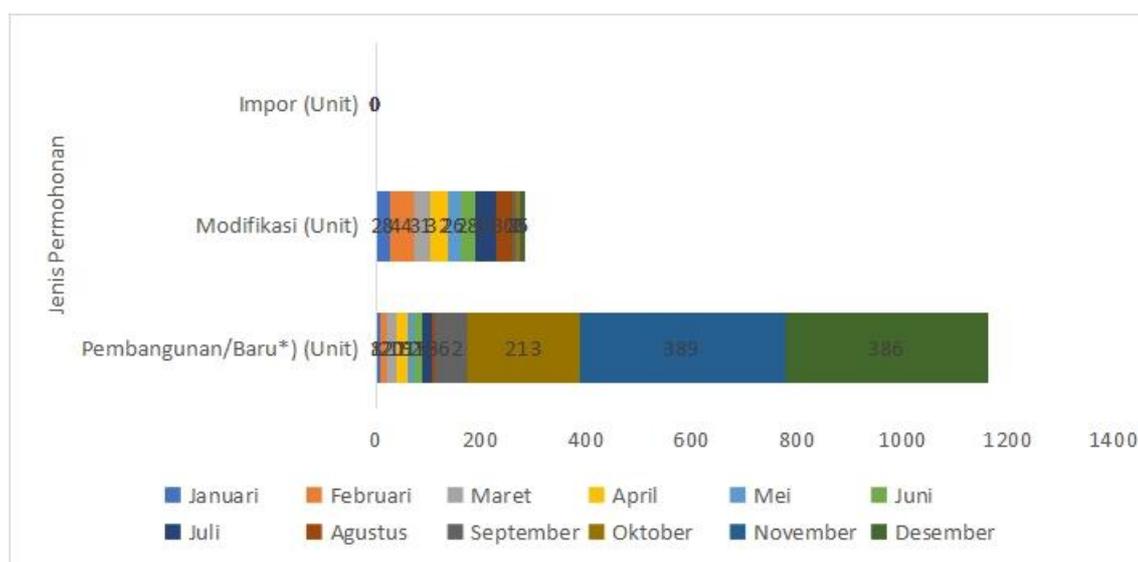


Tabel 8. Jumlah persetujuan pengadaan kapal perikanan Tahun 2021

No	Bulan	Jenis Permohonan			Disetujui (Unit)	Jumlah (Unit)
		Pembangunan/ Baru (Unit) *)	Modifikasi (Unit)	Impor (Unit)		
1	Januari	8	28	0	36	36
2	Februari	12	44	0	56	56
3	Maret	20	31	0	51	51
4	April	19	32	0	51	51
5	Mei	12	26	0	38	38
6	Juni	18	28	0	46	46
7	Juli	18	39	0	57	57
8	Agustus	5	30	0	35	35
9	September	62	8	0	70	70
10	Oktober	213	8	0	221	221
11	November	389	3	0	392	392
12	Desember	386	5	0	391	391
TOTAL		1162	282	0	1444	1444

Keterangan

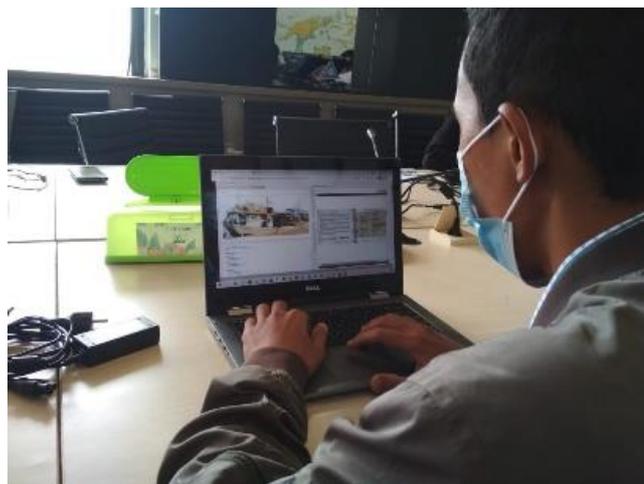
*) = Istilah PPKP Baru sejak tanggal 22 September 2021 menjadi PPKP Pembangunan sesuai dengan Permen KP Nomor 33 tahun 2021



Kendala yang masih dihadapi dalam pelayanan persetujuan pengadaan kapal perikanan yaitu persetujuan pengadaan kapal perikanan Daerah (provinsi) belum dimonitor dan dilaksanakan pembinaan. Kedepan solusi yang diharapkan antara lain adalah menyusun aplikasi SIKAPI bagi Daerah sehingga pelayanan dapat lebih efisien dan koordinasi serta monitoring secara periodik kepada seluruh Provinsi.

a. Penerbitan Buku Kapal Perikanan

Pendaftaran kapal perikanan adalah kegiatan pencatatan kapal perikanan yang dimuat dalam buku kapal perikanan. Sedangkan output dari pendaftaran kapal perikanan berupa Buku Kapal Perikanan (BKP) adalah buku yang memuat informasi yang berisi identitas pemilik dan identitas kapal perikanan serta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas kapal perikanan.



Paralel dengan kegiatan pendaftaran dilakukan pula pemberian tanda pengenal kapal perikanan terhadap kapal perikanan yang didaftarkan. Tanda pengenal kapal perikanan merupakan kegiatan memberikan tanda atau notasi kapal perikanan. Penatakelolaan kegiatan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan, baik pusat maupun daerah, dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi berbasis web yaitu Sistem Informasi Pendaftaran Kapal Perikanan (SIPALKA). Adapun realisasi output pendaftaran kapal perikanan sebanyak 2.305 layanan (184,4%) dari target sebanyak 1.250 layanan. Jumlah pendaftaran kapal perikanan pada Tahun 2021 disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Jumlah pendaftaran kapal perikanan Tahun 2021

No	Bulan	Jenis Permohonan				Jumlah (Unit)	Disetujui (Unit)
		Baru (Unit)	Perubahan (Unit)	Penggantian (Unit) *)	Penghapusan (Unit)		
1	Januari	30	102	25	0	157	157
2	Februari	19	72	16	8	115	115
3	Maret	40	124	28	1	193	193
4	April	10	120	19	1	150	150
5	Mei	24	74	13	0	111	111
6	Juni	19	97	8	8	132	132
7	Juli	21	92	14	0	127	127
8	Agustus	19	114	12	2	147	147
9	September	20	96	6	3	125	125
10	Oktober	30	82	-	1	113	113
11	November	17	403	-	2	422	422
12	Desember	70	443	-	0	513	513
TOTAL		319	1819	141	26	2305	2305

Keterangan

*) = Sesuai dengan Permen KP Nomor 33 tahun 2021, jenis permohonan Penggantian ditiadakan sejak tanggal 14 September 2021.

Kendala yang masih dihadapi dalam pelayanan pendaftaran kapal perikanan :

- 1) Karena kendala tatap muka sehingga penyelesaian aplikasi lebih lambat dari perkiraan.
- 2) Aplikasi yang telah disusun masih terdapat beberapa celah kekurangan
- 3) Penerapan BKP daerah belum optimal (Hanya 12 Provinsi yang aktif) karena keterbatasan SDM, anggaran dan tata laksana di Provinsi.
- 4) Anggaran monitoring penandaan kapal perikanan secara elektronik terkena refocussing sehingga belum dapat dilaksanakan

Kedepan solusi yang diharapkan antara lain adalah :

- 1) Melaksanakan perbaikan/penyempurnaan Aplikasi SIPALKA Online
- 2) Menyusun aplikasi SIPALKA Online bagi Daerah sehingga pelayanan dapat lebih efisien
- 3) Melaksanakan Koordinasi dan Monitoring secara periodik kepada seluruh Provinsi.
- 4) Melaksanakan Sosialisasi penerapan Pendaftaran Kapal Perikanan untuk Provinsi yang belum menerapkan
- 5) pelaksanaan monitoring penandaan kapal perikanan secara elektronik akan diupayakan untuk dilaksanakan pada anggaran berikutnya.

b. Pelayanan Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan



Pelayanan pemeriksaan fisik kapal perikanan sebagai syarat untuk penerbitan/perubahan Buku Kapal Perikanan (BKP) ataupun perpanjangan SIPI/SIKPI. Pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa fisik kapal perikanan, dalam rangka pendaftaran dan perizinan kapal perikanan. Fungsi pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat

penangkapan ikan adalah untuk mencegah kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan secara ilegal dengan memastikan kapal dan alat penangkapan ikan yang digunakan telah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum pelayanan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan adalah sebagai berikut :

- 1) UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 2) UU No. 31 tahun 2004 jo UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan.
- 3) Permen KP Nomor 33 tahun 2021 tentang Log book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan.
- 4) Peraturan MKP Nomor PER.58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap.
- 5) Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 8/KEP-DJPT/2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.

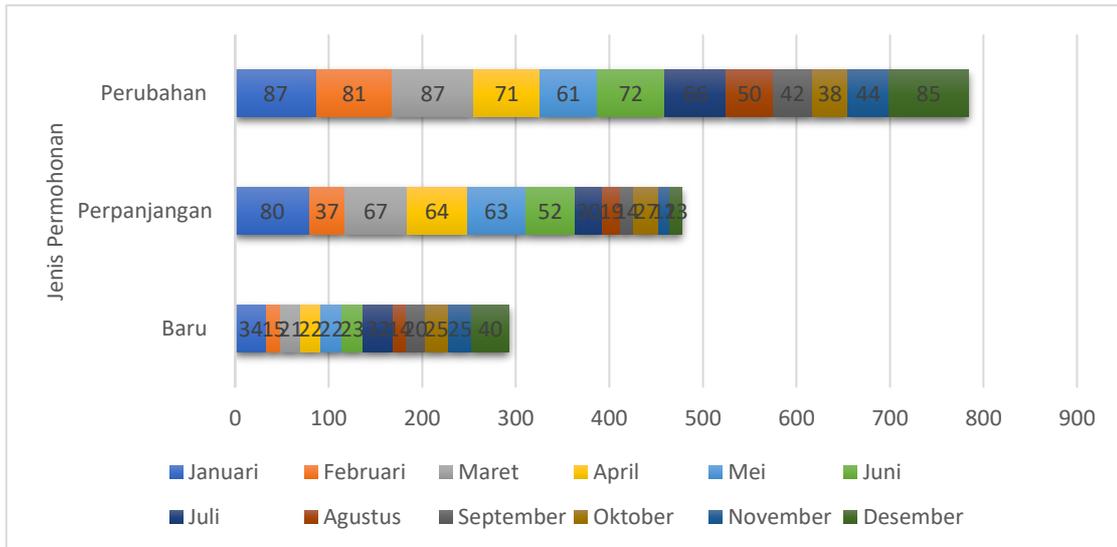
Pelayanan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu secara daring (online) melalui aplikasi Sistem Informasi Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan (SICEFI) dan secara manual (offline). Adapun realisasi Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan tahun 2021 sebanyak 2.023 layanan atau 101,1% dari target sebesar 2.000 layanan yang diperoleh melalui :

- Aplikasi SICEFI online sebanyak 1.555 layanan.
- Permohonan manual offline sebanyak 468 layanan. Layanan ini dilakukan khusus untuk kapal perikanan yang menggunakan alat penangkapan ikan jaring tarik berkantong, berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor: B.502/DJPT/PI.220/VIII/2021 tentang Peralihan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang Menjadi Alat Penangkapan Ikan yang Diperbolehkan.

Jumlah penerbitan pemeriksaan fisik melalui Aplikasi SICEFI Tahun 2021 disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Jumlah penerbitan pemeriksaan fisik melalui Aplikasi SICEFI Tahun 2021

No	Bulan	Jenis Permohonan			Jumlah
		Baru (Unit)	Perpanjangan (Unit)	Perubahan (Unit)	
1	Januari	34	80	87	201
2	Februari	15	37	81	133
3	Maret	21	67	87	175
4	April	22	64	71	157
5	Mei	22	63	61	146
6	Juni	23	52	72	147
7	Juli	32	30	66	128
8	Agustus	14	19	50	83
9	September	20	14	42	76
10	Oktober	25	27	38	90
11	November	25	12	44	81
12	Desember	40	13	85	138
TOTAL		293	478	784	1555



Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan :

- Masih terdapat beberapa kekurangan pada aplikasi;
- Terdapat petugas pemeriksa fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang tidak siap ditugaskan ketika mendapatkan surat tugas;
- Keterlambatan dalam pelaporan atau perbaikan laporan oleh petugas pemeriksa fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;
- Keterbatasan jumlah petugas verifikator dalam proses verifikasi laporan hasil pemeriksaan fisik;

Kedepan solusi yang diharapkan antara lain adalah :

- Melaksanakan perbaikan / penyempurnaan Aplikasi SICEFI;
- Melaksanakan Rapat Koordinasi seluruh petugas pemeriksa fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan untuk melakukan upgrading dan evaluasi;
- Peningkatan kompetensi dan jumlah petugas verifikator dalam melakukan verifikasi laporan hasil pemeriksaan fisik

Terdapat kegiatan bantuan kapal perikanan yang tidak dimuat dalam sasaran kinerja yaitu bantuan sarana penangkapan ikan yang berupa kapal penangkap ikan dengan tujuan untuk mendukung usaha nelayan yang ditujukan kepada koperasi nelayan. Bantuan kapal perikanan tahun anggaran 2021 pada awalnya sebanyak 97 unit terdiri dari pengadaan Tugas Pembantuan 95 unit (kapal 5 GT: 85 unit dan kapal 10 GT : 10 unit) dan pengadaan Pusat 2 unit kapal 30 GT. Kemudian sehubungan dengan pemotongan anggaran/refocusing tahap IV pada tahun 2021 maka pengadaan bantuan kapal perikanan melalui pusat dan Tugas Pembantuan (TP) berkurang untuk penanggulangan Covid-19. Untuk bantuan kapal yang masih dilaksanakan adalah dari pengadaan TP Dinas Maluku Utara karena sudah kontrak dan berjalan proses pembangunannya dengan

realisasi mencapai 100% di mana telah dilaksanakan serah terima kapal sesuai dengan berita acara serah terima bantuan kapal penangkap ikan yang meliputi sebanyak 4 unit kapal 10 GT dan sebanyak 10 unit kapal 5 GT.

BANTUAN KAPAL TP MALUKU UTARA

No.	Kab/Kota	Nama Penerima	Ukuran Kapal		Jumlah
			5 GT	10 GT	
1	Halmahera Barat	Koperasi Perikanan Momina Jiko	1	0	1
2	Halmahera Selatan	Koperasi Nelayan Saruma Pesisir Jaya	1	0	1
3	Halmahera Selatan	KSU Mina Makuwaje	2	0	2
4	Tidore Kepulauan	Koperasi Khalifah Putra	2	0	2
5	Kota Ternate	Koperasi Santo Alfin Pratama	1	1	2
6	Halmahera Barat	Koperasi Multi Tuna Gemilang	2	1	3
7	Halmahera Selatan	Koperasi Laut Bacan	1	2	3
Total			10	4	14

3.1.2. IKU.02. Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan memenuhi ketentuan (unit)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah alat penangkap ikan dari hasil rekapitulasi antara alat penangkap ikan bantuan dan API yang telah melalui proses cek fisik dan memperoleh rekomendasi untuk digunakan sesuai PERMEN KP No.71/PERMEN KP/2018 tentang tata kelola alat penangkapan ikan serta sesuai dengan KEPMEN KP No. KEP.06/MEN/2010 tentang Rancang Bangun dan Standarisasi Penamaan API. Formula perhitungan capaiannya adalah:

- a. Jumlah bantuan alat penangkap ikan
- b. Jumlah alat penangkap ikan yang telah di cek fisik dan memperoleh rekomendasi laik tangkap

Pada awalnya rekomendasi alat penangkapan ikan yang memenuhi ketentuan merupakan bagian dari target Jumlah Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Terbangun Dan Memenuhi Ketentuan (unit). Selanjutnya pada Triwulan II tahun 2021 tidak dihitung karena termasuk dalam proses bisnis rekomendasi pemeriksaan fisik kapal dan alat penangkapan ikan. Direktorat KAPI menerbitkan surat keterangan desain dan ukuran alat penangkapan ikan yang merupakan hasil pemeriksaan fisik alat penangkapan ikan terkait perizinan usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan ukuran di atas 30 GT. Hal ini merupakan bagian dari pemantauan alat penangkapan ikan yang sesuai dengan ketentuan

Bantuan Alat Penangkapan Ikan

Program bantuan langsung masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan meningkatkan produksi perikanan, melalui peningkatan produktivitas penangkapan ikan namun dengan tetap mempertahankan keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungannya. Upaya yang dilakukan KKP adalah dengan restrukturisasi armada penangkapan ikan dan penggunaan API LIFE FISHING (low impact, fuel efficient). Bantuan API terdiri dari kelompok API yang ramah lingkungan yaitu antara lain jaring insang/gillnet, bubu rajungan, pancing ulur, dan rawai dasar.

Pada tahun 2021 KKP menganggarkan bantuan API sebanyak 12.000 unit dan API telah disalurkan kepada nelayan di seluruh Kab/kota yang mengusulkan dan memenuhi syarat sesuai

dengan Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Ikan. Proses pengadaan API dilakukan dengan sistem lelang umum. Adapun spesifikasi teknis API disesuaikan dengan kebutuhan penerima.

Tujuan bantuan alat penangkapan ikan yaitu mendukung keberlangsungan usaha nelayan kecil. Sasaran bantuan alat penangkapan ikan yaitu: a) koperasi; dan b) kelompok usaha bersama. Indikator keberhasilan bantuan alat penangkapan ikan yaitu tersalurkannya bantuan alat penangkapan ikan dengan tepat waktu. Adapun capaian kegiatan bantuan alat penangkapan ikan yang tersalurkan di tahun 2021 sebesar 12.525 unit (104,4%) dari target sebesar 12.000 unit. Kelebihan capaian pengadaan bantuan API sebanyak 525 unit diperoleh dari optimalisasi pemanfaatan sisa kontrak (addendum). Disamping kegiatan pengadaan bantuan API sebanyak 12.525 unit, Dit.KAPI juga memberikan bantuan API dan bimbingan teknis serta memperkenalkan jenis alat tangkap baru yang ramah lingkungan melalui kegiatan familiarisasi alat penangkapan ikan. Daftar bantuan API yang disalurkan disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Daftar Lokasi Tujuan Pengiriman, Kode dan Kuantitas Pengadaan Alat Penangkapan Ikan (API) Tahun 2021

No.	Lokasi Tujuan Pengiriman	Kode API	Jumlah Paket	Keterangan
1.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Jaya Jl. Pinto Sa Dalam - Kuala Meurisi Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya - DI. Aceh	GN 2	120	Terakit
		GN 3	20	Terakit
		GN 4	40	Terakit
2.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Selatan Jl. T. Cut Ali No. 261 Desa Lhok Bengkuang Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan - DI. Aceh	GN 2	290	Terakit
		GN 3	10	Terakit
		GN 4	285	Terakit
		GN 5	50	Terakit
		1 R 100	36	Terakit
3.	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Tamiang Jl. Ir. H. Juanda No. 96 Desa Tanah Terban, Karang Baru Kab. Aceh Taming - DI. Aceh24476	BR 15	35	Terakit
		GN 2	55	Terakit
		GN 3	30	Terakit
		GN 4	65	Terakit
		GN 5	35	Terakit
		R 100	6	Terakit
4.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH UTARA Jl. Mayjen T.Hamzah Bendahara Kode Pos 24351 Lhokseumawe - DI. Aceh	GN 2	300	Terakit
		GN 3	160	Terakit
		GN 4	95	Terakit
		GN 5	60	Terakit
5.	Dinas kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan KOTA IHOKSEUMA WE Jl. H.Ramli Ridwan Desa Mon Geudong Kota Lhokseumawe - DI. Aceh	GN 2	320	Terakit
		GN 3	55	Terakit

No.	Lokasi Tujuan Pengiriman	Kode API	Jumlah Paket	Keterangan
6.	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen I1. Laksamana Malahayati No. 1 Kabupaten Bireuen - DI. Aceh	GN 2	45	Terakit
		GN 3	210	Terakit
		GN 4	85	Terakit
7.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab, Pidie I1. Prof. A. Majid Ibrahim Sigli - DI. Aceh	GN 2	25	Terakit
		GN 3	255	
		HL 5	150	
		R 100	98	
8.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang Jl. KH. Agus Salim Desa le Meulee Kec. Sukajaya Kota Sabang - D1. Aceh	GN 2	40	Terakit
		HIL 5	46	Terakit
9.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Simeulue Jl. Syari'ah Desa Amiria Bahagia Kec. Simeulue Timur Kab, Simeulue - DI. Aceh	GN 2	45	Terakit
		GN 3	215	Terakit
		GN 4	290	Terakit
		HL 5	132	Terakit
		R 100	77	Terakit
10.	Dinas Kelautan dan Perikanan Mandailing Natal Komplek Perkantoran Payaloting, Jl. Lintas Sumatera, Desa Parbaungan Kecamatan Panyabungan, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara	GN 2	135	Terakit
		GN 4	5	
		GN 5	70	
11.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tapanuli Tengah Jalan Oswald Siahaan No.20, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara	GN 2	100	Terakit
12.	Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Jl. Muara No. 51 A Kota Padang - Sumatera Barat	GN 2	105	Terakit
		GN 3	20	Terakit
13.	Dinas perikanan dan ketahanan pangan Komplek gor rang agam padang baru kec lubuk basung, Kabupaten Agam - Sumatera Barat	GN 2	50	Terakit
		GN 4	20	Terakit
14.	Dinas Perikanan Kab. Pesisir Selatan I1. Diponegoro Painan Selatan Kabupaten Pesisir	BR 15	20	Terakit
		GN 2	485	Terakit
		GN 3	45	Terakit

No.	Lokasi Tujuan Pengiriman	Kode API	Jumlah Paket	Keterangan
	Selatan - Sumatera Barat	GN 4	50	Terakit
15.	Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti Pelabuhan Perikanan No. 1, Selatpanjang Kota, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti. Provinsi Riau	GN 2	210	Terakit
		GN 3	160	Terakit
		GN 5	60	Terakit
16.	Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Jl. A. Yani (Jalur 2), Parit Padang, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33215	BR 15	135	Terakit
		GN 2	15	Terakit
		GN 3	20	Terakit
		GN 4	15	Terakit
		GN 5	A150	Terakit
		HI 5	20	Terakit
		R 100	105	Terakit
17.	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan Kabupaten Bangka Selatan J. Gn. Namak, Gadung, Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung 33183	GN 2	280	Terakit
		GN 5	35	Terakit
18.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkal Pinang J. Laksamana Malahayati RT.02 RW.01, Kel. Air Mawar, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung	BR 15	45	Terakit
		GN 2	10	Terakit
		HL 5	20	Terakit
19.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung J1. Dr. Warsito No.54 Kel. Kupang Kota, Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung - Prov. Lampung	BR 15	15	Terakit
		GN 2	105	Komponen
		GN 3	30	Komponen
20.	Dinas Perikanan Kab. Tanggamus Jl. Gatot Subroto No. 01 Komplek Perda Tanggamus Kab. Tanggamus - Prov. Lampung	GN 2	90	Terakit
21.	Dinas Perikanan Kab. Tanjung Jabung Barat Jl. Letkol Pol Toegino No.1, Desa Petunas, Kec. Tungkal Ilir - Prov Jambi	GN 2	50	Terakit
		GN 4	25	Terakit
22.	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab, Indramayu J. Pabean Udik No. 1 Desa Pabean Udik Kec. Indramayu - Jawa Barat	BR 15	155	Terakit
		GN 2	280	Terakit
		GN 3	430	Terakit
		GN 4	110	Terakit

No.	Lokasi Tujuan Pengiriman	Kode API	Jumlah Paket	Keterangan
		GN 5	5	Terakit
23.	Dinas Perikanan Kabupaten Subang Jl. A. Nata Sukarya, No. 28, Kelurahan Pasir Kareumbi, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat	GN 2	725	Komponen
		GN 2	440	Terakit
		GN 3	435	Terakit
		GN 4	50	Terakit
24.	Dinas Perikanan dan Kelautan Bantaeng Jalan Raya Lanto No.76, Desa Tappanjeng, Kecamatan Banteng, Bantaeng-Sulawesi Selatan	GN 2	175	Terakit
		GN 3	55	Terakit
		GN 4	355	Terakit
		GN 5	155	Terakit
		HL 5	10	Terakit
		R 100	60	Terakit
25.	Dinas Perikanan Bone Jalan Kalimantan Nomor 48, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Bone - Sulawesi Selatan	BR 15	180	Terakit
		GN 2	55	Terakit
		GN 5	195	Terakit
26.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton Selatan J1. Gajah Mada, Desa Laompo, Kecamatan Batauga, kabupaten Buton Selatan - Sulawesi Tenggara	GN 2	240	Terakit
		GN 5	5	Terakit
		HI 5	56	Terakit
		R 100	6	Terakit
27.	Dinas Perikanan kabupaten Muna Bypass Poros Pokadulu - Motewe, Desa Sidodadi, Kec Batalaiworu, kabupaten Muna - Sulawesi Tenggara	GN 2	125	Terakit
		GN 4	240	Terakit
		GN 5	30	Terakit
		HL 5	10	Terakit
		R 100	270	Terakit
28.	Dinas Perikanan Kabupaten Sikka Jl. Litbang Kota Uneng Kecaratan Alok Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur	GN 2	185	Terakit
		GN 3	425	Terakit
29.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Timur I1. Jenderal Soeharto No. 52 Kel. Hambala Kec. Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur	GN 2	125	Terakit
		GN 3	125	Terakit
30.	Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi, Gedung PEMP Muaragembong, Jalan Raya Muaragembong, Desa Pantai	BR 15	250	Terakit
		GN 2	200	Terakit

No.	Lokasi Tujuan Pengiriman	Kode API	Jumlah Paket	Keterangan
	Mekar, Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi	GN 4	75	Terakit
Total			12.525	

Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan memenuhi ketentuan (unit) Tahun 2021 adalah:

Tabel 12. Capaian jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan memenuhi ketentuan Tahun 2021

No	Komponen Indikator Kinerja	TW IV
1.	Jumlah bantuan alat penangkap ikan yang tersalurkan	12.525
Capaian		12.525

Capaian jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan memenuhi ketentuan Tahun 2021 berupa pengadaan alat tangkap sebanyak 12.525 paket dan pada tahun 2020 sebanyak 19.956 paket. Penurunan jumlah paket bantuan alat tangkap tahun 2021 mengikuti ketersediaan anggaran, yaitu tahun 2020 sebesar Rp9.180.086.075 dan tahun 2021 sebesar Rp5.999.307.325.

Kegiatan distribusi bantuan alat penangkapan ikan tahun 2021



3.1.3. IKU.03. Persentase mesin dan kapal perikanan yang dihitung produktivitasnya dan terpantau operasionalnya (persen)

Merupakan indikator yang menunjukkan persentase standarisasi permesinan kapal yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan serta kapal perikanan yang dipantau operasionalnya dan dapat dihitung produktivitasnya. Formula perhitungan persentase capaiannya adalah:

- Menghitung jumlah pemantauan dan standarisasi permesinan kapal yang memenuhi aspek dan operasional kapal penangkapan ikan (orang)
- Menghitung jumlah kapal bantuan pemerintah yang dipantau operasionalnya (unit)
- Jumlah kapal perikanan yang dihitung produktivitasnya berdasarkan data produksi antara lain : LKU/LKP, Logbook Penangkapan Ikan, PIPP. Produktivitas Kapal Penangkap Ikan per API =
$$\frac{\Sigma \text{Hasil Tangkapan Ton Perjenis API}}{\Sigma \text{Total GT kapal Ton Perjenis API}}$$

Persentase Mesin dan Kapal Perikanan yang Dihitung Produktivitasnya dan Terpantau Operasionalnya (persen) Tahun 2021 disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Capaian persentase mesin dan kapal perikanan yang dihitung produktivitasnya dan terpantau operasionalnya tahun 2021

No	Komponen Indikator Kinerja	TW I (%)	TW II (%)	TW III (%)	TW IV (%)
1.	Jumlah kapal perikanan yang dihitung produktivitasnya (T = 6.300) (R = 7.058)	47,46	71,33	96,83	112,03
2.	Jumlah kapal perikanan bantuan yang dipantau Operasionalnya (T = 2.513) (R = 2.513)	69,95	77,03	83,88	100
3	Jumlah pemantauan dan standarisasi permesinan kapal yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan (T = 360) (R = 445)	20,00	61,11	77,78	123,61
Capaian		45,80	69,82	86,17	111,88

Keterangan:
T : Target
R : Realisasi

Capaian persentase mesin dan kapal perikanan yang dihitung produktivitasnya dan terpantau operasionalnya tahun 2021 adalah sebesar 111,88%, dibandingkan tahun 2020 sebesar 100%. Mengalami kenaikan sebesar 11,88%.

a. Perhitungan Nilai Produktivitas Kapal Penangkap Ikan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 86/KEP-MEN/2016 tentang Produktivitas Kapal Perikanan, produktivitas kapal penangkap ikan didefinisikan sebagai tingkat kemampuan kapal memperoleh hasil tangkapan. Produktivitas kapal penangkap ikan antara lain mempertimbangkan ukuran tonnase kapal, bahan kapal, kekuatan mesin, jenis alat tangkap, jumlah trip operasi, kemampuan tangkap pertrip dan wilayah penangkapan. Produktivitas kapal penangkap ikan ini perlu dihitung karena nilai produktivitas kapal penangkap ikan diantaranya digunakan sebagai dasar untuk menghitung nilai pungutan hasil perikanan. Tahun 2021 target output perhitungan nilai produktivitas kapal penangkap ikan adalah 6.300 unit kapal penangkap

ikan dan capaian realisasi adalah 7.058 unit kapal penangkap ikan (112,03%) dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Rincian data produktivitas kapal penangkap ikan

No	Sumber Data	Jumlah Data
1	PIPP	3048
2	Logbook	3953
3	Data Lapangan (Cilacap, Bitung, Ternate, Pemangkat, Pekalongan)	57
Total		7058

Kunjungan ke lapangan guna melakukan validasi data terhadap data produksi kapal perikanan yang telah diterima, antara lain:

- Validasi data produktivitas kapal perikanan di PPN Pekalongan dan PPN Kejawan tanggal 12 – 14 Maret 2021
- Validasi data produktivitas kapal perikanan di PPS Nizam Zachman tanggal 22 Maret 2021;
- Validasi data produktivitas kapal perikanan di PP Karangsong (Indramayu) tanggal 29 Maret – 2 April 2021;
- Validasi data produktivitas kapal perikanan di PN Pelabuhan Ratu (Sukabumi) tanggal 29 Maret – 2 April 2021;
- Validasi data produktivitas kapal perikanan di PP Tegalsari (Tegal) tanggal 29 Maret – 2 April 2021;
- Validasi data produktivitas kapal perikanan di PPS Belawan tanggal 28 – 30 April 2021;
- Validasi data produktivitas kapal perikanan di PPS Bitung tanggal 2 – 5 Mei 2021;
- Validasi data produktivitas kapal perikanan di PP Eretan tanggal 8 – 10 Agustus 2021;
- Validasi data produktivitas kapal perikanan di PPS Cilacap tanggal 11 – 13 Agustus 2021;
- Validasi data produktivitas kapal perikanan di PPS Kendari tanggal 9 – 12 September 2021;
- Validasi data produktivitas kapal perikanan di PPN Ternate tanggal 23 – 26 Oktober 2021

Selanjutnya terhadap data produktivitas kapal penangkap ikan dimaksud dilakukan analisa dan perhitungan produktivitasnya untuk digunakan sebagai referensi dalam evaluasi penetapan angka atau nilai produktivitas kapal penangkap ikan.

Kendala utama yang dihadapi dalam perhitungan nilai produktivitas kapal penangkap ikan adalah terbatasnya akses terhadap data. Saat ini Direktorat KAPI belum mengakses langsung terhadap data antara lain : data PIPP, data SPB data Logbook Perikanan, sehingga untuk mendapatkan data tersebut Direktorat KAPI harus selalu menyampaikan surat permohonan data kepada Direktorat terkait. Solusi, Koordinasi dengan Direktorat terkait untuk mendapatkan akses data langsung melalui sistem aplikasi.



b. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sarana Penangkapan Ikan (BSPI)

Bantuan sarana penangkapan ikan adalah bantuan pemerintah dalam bentuk kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan, dan atau mesin kapal perikanan. Setelah Bantuan Sarana Penangkapan Ikan diserahkan kepada penerima bantuan, perlu dilakukan pemantauan operasional paket BSPI yang dibagikan kepada penerima. Diharapkan setiap bantuan yang diterima oleh masyarakat dapat termanfaatkan dengan optimal sehingga dapat meningkatkan ekonomi nelayan penerima bantuan. Dari target Output/Indikator keberhasilan terpantaunya pemanfaatan kapal bantuan pada 2.513 unit kapal, tercapai sebanyak 2.513 unit (100%) dengan rincian disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15. Rincian Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sarana Penangkapan Ikan (BSPI)

No.	Kegiatan	Jumlah (unit)
1	Evaluasi Kapal Bantuan Tahun 2015 - 2019	1.758
2	Monev lapangan :	451
	a. Kab. Minahasa dan Kab. Minahasa Tenggara	69
	b. Kab. Karimun	2
	c. Kab. Takalar	6
	d. Provinsi Sulawesi Utara	87
	e. Gorontalo	118
	f. Kepulauan Tanimbar	68

	g. Bantul	3
	h. Kabupaten Konawe Selatan	4
	i. Jakarta Utara	8
	j. Kabupaten Serang	17
	k. Kabupaten Lombok Barat	6
	l. Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Bulukumba	5
	m. Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa	14 6
	n. Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie	28
	o. Kota Palu dan Donggala	10
	p. Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Kabupaten Pinrang	
3	Laporan kelompok Nelayan dari 11 Kabupaten/Kota	172
4.	Pemantauan melalui kompilasi laporan operasional yang disampaikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan	132
Total		2.513

Berdasarkan hasil pemantauan Kapal Bantuan yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2021, dari 2.513 kapal bantuan yang terbangun Tahun 2015 – 2019 didapatkan hasil bahwa 1.991 unit kapal bantuan saat ini masih beroperasi dengan baik, namun sebanyak 522 unit kapal bantuan sedang/sudah tidak operasional.

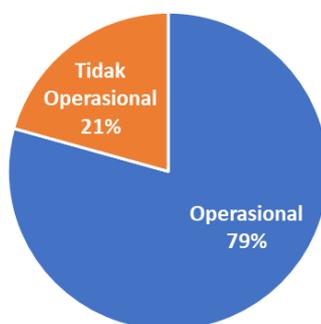


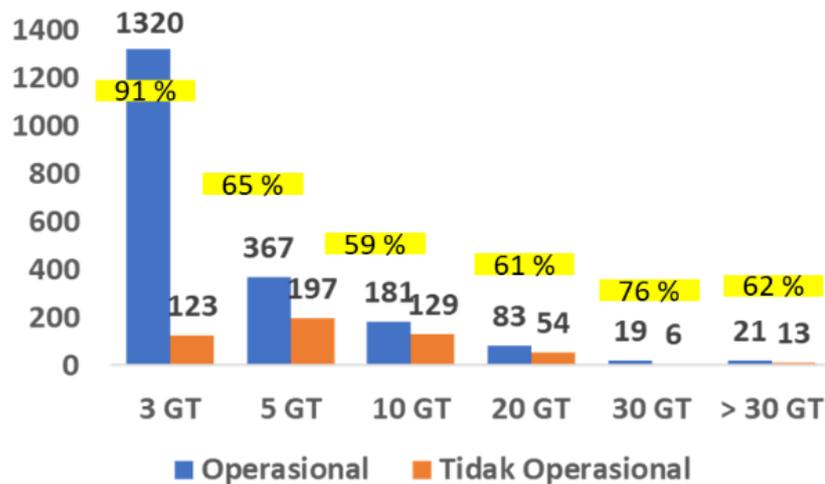
Diagram Pemanfaatan Kapal Bantuan TA. 2015 – 2019

Dari 2.513 kapal bantuan terbangun jika diurutkan berdasarkan tahun pembangunannya maka persentase pemanfaatan kapal bantuan tertinggi adalah pada tahun 2018 (96 % termanfaatkan) dan 2019 (93 % termanfaatkan). Terhadap kapal bantuan TA. 2015 pemanfaatan sebesar 57 %, TA. 2016 sebesar 68 % dan TA. 2017 sebesar 77 %. Dan total kapal bantuan 2015 – 2019, maka pemanfaatannya sebesar 79%.



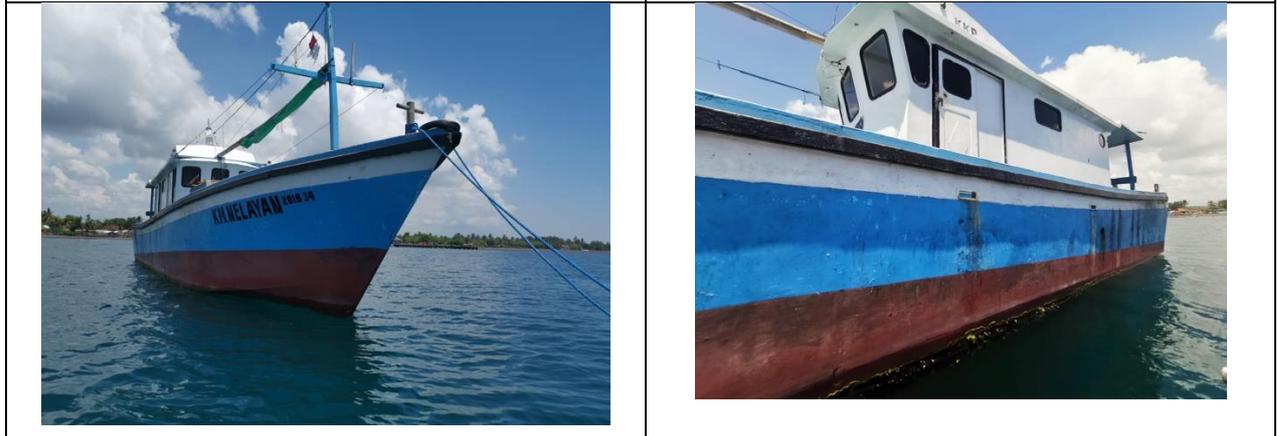
Grafik Pemanfaatan Kapal Bantuan TA. 2015 – 2019

Dari 2.513 kapal bantuan terbangun jika diurutkan berdasarkan kategori ukuran kapal maka persentase pemanfaatan kapal bantuan tertinggi adalah kapal dengan ukuran dibawah < 5 GT. Berdasarkan hasil pelaporan, didapatkan informasi bahwa pemanfaatan kapal bantuan berukuran dibawah < 5 GT mencapai 91 % yaitu 1.320 unit dari 1.443 kapal bantuan dengan ukuran tersebut dimanfaatkan dengan maksimal.



Grafik Pemanfaatan Kapal Bantuan berdasarkan range GT Kapal

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam rangka pengendalian COVID-19 di beberapa wilayah sehingga tidak seluruh Dinas Kelautan Perikanan Provinsi hadir di kegiatan pertemuan evaluasi kapal bantuan. Solusi, bagi wilayah yang belum hadir pada saat pertemuan evaluasi kapal bantuan akan dilakukan kunjungan lapangan oleh tim DJPT.



Kegiatan Monitoring dan Evaluasi BSPI di Lapangan



Kegiatan evaluasi kapal bantuan 2015 -2019

c. Pelayanan Permesinan di Sentra Nelayan (*Service Campaign*)

Kegiatan Pelayanan Permesinan di Sentra Nelayan (*Service Campaign*) dilaksanakan melalui supervisi dan evaluasi peningkatan pengetahuan/kompetensi nelayan dibidang permesinan. Pelayanan permesinan bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan terkait perawatan dan pemeliharaan mesin kapal perikanan khususnya mesin tempel outboard serta informasi lainnya berkenaan dengan perkembangan teknologi di bidang permesinan yang sedang dikembangkan. Dari target kegiatan pelayanan permesinan di sentra nelayan pada tahun 2021 adalah sebanyak 360 orang nelayan tercapai sebanyak 445 nelayan (123,61%) ditingkatkan kemampuan teknisnya dengan rincian disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16. Rincian Pelayanan Permesinan di Sentra Nelayan Tahun 2021

Nomor	Lokasi	Jumlah (orang)
1	Kabupaten Pangandaran	80
2	Kota Kendari	30
3	Kabupaten Konawe	30
4	Kabupaten Konawe Utara	30
5	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	50
6	Kabupaten Kebumen	60
7	Kota Tidore	20
8	Kabupaten Karawang	29
9	Kabupaten Lombok Timur	26
10	Kabupaten Bantul	90
Total		445

Gambaran secara rinci pelaksanaan kegiatan pelayanan permesinan kapal perikanan adalah sebagai berikut:

- a. tanggal 06-08 April 2021 di PP Cikidang - Kab. Pangandaran, Jawa Barat kepada 80 orang nelayan berupa service gratis meliputi tune up, pemberian suku cadang (spare part) berupa busi, oli mesin, oli gardan dan servis ringan terhadap 72 unit mesin outboard 15 HP yang berasal dari 4 sentra nelayan yaitu pangandaran, Babakan, Pananjung dan Wonoharjo oleh Teknisi Yamaha;
- b. tanggal 15-17 Juni 2021 di Kota Kendari, Kab. Konawe Utara & Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara kepada 90 orang nelayan berupa service gratis meliputi tune up, pemberian suku cadang (spare part) berupa busi, oli mesin, oli gardan dan servis ringan terhadap 43 unit mesin outboard 20 HP oleh Teknisi Honda;
- c. tanggal 29 Juni-01 Juli 2021 di PP Ukurlaran - Kab. Kep. Tanimbar, Maluku kepada 50 orang nelayan berupa service gratis meliputi tune up, pemberian suku cadang (spare part) berupa busi, oli mesin, oli gardan dan servis ringan terhadap 11 unit mesin outboard 20 HP oleh Teknisi Honda.
- d. tanggal 14 – 17 September 2021 di Kabupaten Kebumen kepada 60 orang nelayan berupa service gratis meliputi tune up, pemberian suku cadang (spare part) berupa busi, oli mesin, oli gardan dan servis ringan terhadap 60 unit mesin outboard 15 HP oleh Teknisi Yamaha.
- e. tanggal 23 – 26 Oktober 2021 di Kota Tidore kepada 20 orang nelayan berupa service gratis meliputi tune up, pemberian suku cadang (spare part) berupa busi, oli mesin, oli gardan dan servis ringan terhadap 20 unit mesin outboard 15 HP oleh Teknisi Honda.
- f. tanggal 26 Oktober 2021 di Kabupaten Karawang kepada 29 orang nelayan berupa service gratis meliputi tune up, pemberian suku cadang (spare part) berupa busi, oli mesin, oli gardan dan servis ringan terhadap 29 unit mesin.
- g. tanggal 26 – 27 Oktober 2021 di Kabupaten Aceh Timur berupa service gratis meliputi tune up, pemberian suku cadang (spare part) berupa busi, oli mesin, oli gardan dan servis ringan terhadap 5 unit mesin;
- h. tanggal 23 – 26 November 2021 di Kabupaten Lombok Timur kepada 26 orang nelayan berupa service gratis meliputi tune up, pemberian suku cadang (spare part) berupa busi, oli mesin, oli gardan dan servis ringan terhadap 10 unit mesin
- i. tanggal 23 – 26 November 2021 di Kota Mataram berupa service gratis 13 unit mesin merk Tohatsu (11 unit) dan Merkuri (3 unit)
- j. tanggal 23 – 26 November 2021 di Kabupaten Bantul kepada 90 orang nelayan berupa service gratis meliputi tune up, pemberian suku cadang (spare part) berupa busi, oli mesin, oli gardan dan servis ringan terhadap 45 unit mesin

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah keterbatasan data mesin kapal perikanan yang ada di KKP dan kondisi saat ini masih dalam keadaan pandemi covid-19 yang sehingga tidak memungkinkan untuk mengumpulkan nelayan dalam jumlah yang banyak. Kedepan perlu dilakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota setempat untuk mendapatkan data mesin kapal perikanan yang terbaru dan mengalokasikan barang yang menunjang protokol kesehatan (masker dan handsanitizer), menggunakan tempat pertemuan yang tidak tertutup, serta menjaga jarak di lokasi pertemuan.



3.2. Sasaran Kegiatan (SK-2) : Pengelolaan awak kapal perikanan yang berdaya saing

3.2.1. IKU.04. Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi (orang)

Merupakan indikator yang menunjukkan penambahan jumlah awak kapal perikanan yang meningkat kemampuannya, mempunyai sertifikat keterampilan dan keahlian di tiap-tiap provinsi sejak tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi (orang) Tahun 2021 disajikan pada Tabel 17.

Tabel 17. Capaian jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi Tahun 2021

No	Komponen Indikator Kinerja	TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Sertifikasi Awak Kapal Perikanan	SKPI	688	978	1.284	1.864
		AAPI	-	59	59	89
2.	Perjanjian Kerja Laut (PKL) bagi Awak Kapal Perikanan	700	1.600	2.444	76.597	
3	Sertifikasi Awak Kapal Perikanan & Perjanjian Kerja Laut (PKL) bagi Awak Kapal Perikanan Tahun 2020	11.000	11.000	11.000	11.000	
Capaian		11.950	13.637	14.787	89.550	

Keterangan :

SKPI : Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan

AAPI : Sertifikasi Ahli Alat Penangkapan Ikan

Capaian jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi Tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2020 sebesar 70.912 dan pada tahun 2021 sebesar 89.550 awak kapal perikanan.

a. Awak Kapal Perikanan yang Disertifikasi

Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan adalah pengakuan terhadap keahlian untuk melakukan pekerjaan sebagai awak kapal perikanan setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh dewan penguji keahlian awak Kapal Perikanan, untuk semua jenjang pendidikan dan pelatihan awak Kapal Perikanan. Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan adalah pengakuan terhadap keterampilan untuk melakukan pekerjaan tertentu di Kapal Perikanan setelah lulus ujian keterampilan yang diselenggarakan oleh lembaga pelaksana pendidikan dan pelatihan awak Kapal Perikanan yang telah mendapatkan pengesahan (approval).

Sertifikasi yang dilaksanakan melalui kegiatan Bimbingan Teknis, untuk dua jenis kompetensi, yaitu a) kompetensi layak tangkap dan b) kompetensi layak simpan. Pelaksanaan bimbingan teknis dilaksanakan oleh : a) Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan; b) UPT Pelabuhan Perikanan lingkup KKP (22 UPT); c) SMK bidang Kelautan dan Perikanan (21 SMK); dan d) Lembaga swasta (2 unit).

Selama periode Januari s.d. Desember 2021, telah diterbitkan sertifikat awak kapal perikanan sebanyak 1.953, terdiri atas : a) Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI) untuk laik simpan sebanyak 1.864 sertifikat dan b) Sertifikat Ahli Alat Penangkapan Ikan (AAPI) untuk laik tangkap sebanyak 89 sertifikat. Pelaksanaan Bimtek selama tahun 2021 dilaksanakan di 30 lokasi, yaitu: a) 22 UPT Pelabuhan Perikanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap; b) 7 lokasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi; dan c) 1 lokasi SMK Kelautan dan Perikanan. Dengan demikian secara kumulatif sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 capaian sertifikasi awak kapal perikanan sebanyak 18.442 orang.



Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi awak kapal perikanan adalah sebelum penetapan Permen KP 33 tahun 2021, kewenangan sertifikasi oleh Ditjen Perikanan Tangkap, Cq. Direktorat KAPI hanya untuk kompetensi laik tangkap dan laik simpan. Kedepan laik tangkap dan laik simpan ditambah dengan laik laut yang didukung oleh kompetensi atau sertifikasi awak kapal perikanan.



b. Pelaksanaan Penerapan Perjanjian Kerja Laut

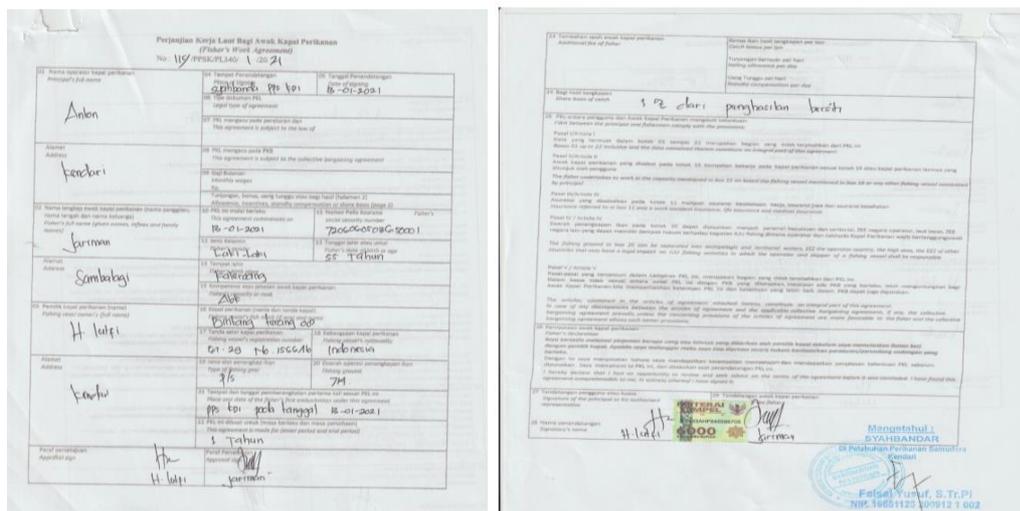
Perjanjian Kerja Laut (PKL) merupakan bentuk ikatan antara pemilik/operator kapal perikanan selaku pemberi kerja dengan Awak Kapal Perikanan (AKP) yang dipekerjakan di kapal perikanan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kerja dan pemenuhan hak-hak bagi awak kapal perikanan selama bekerja dan risiko usaha bagi pemilik kapal perikanan. Dokumen PKL dibuat oleh pemilik kapal bersama dengan AKP dan disahkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan. Dokumen PKL memuat informasi tentang: a) identitas AKP; b) Identitas pemilik kapal; c) identitas kapal perikanan; d) jenis dan jangka waktu PKL; e) hak dan kewajiban para pihak; f) sistem pengupahan (gaji bulanan atau bagi hasil); g) jam kerja, cuti dan izin kerja, serta; h) kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan/asuransi. Saat ini pelaksanaan PKL diwajibkan bagi awak kapal yang bekerja pada kapal perikanan ukuran di atas 30 GT, sedangkan persyaratan PKL

bagi AKP yang bekerja di kapal perikanan berukuran >5GT s.d 30GT mulai berlaku pada tanggal 3 Februari 2024.

Jenis PKL terdiri atas 3 skema, yaitu: (i) waktu terbatas; (ii) satu kali operasi; dan (iii) waktu tidak terbatas. Untuk mendorong kepatuhan sekaligus memberikan kemudahan bagi pemilik/operator kapal perikanan dalam membuat dokumen PKL, maka pada tahun 2021 Direktorat KAPI telah membangun aplikasi PKL berbasis elektronik. Aplikasi tersebut disematkan dalam aplikasi yang sudah ada, yaitu TemanSPB. Aplikasi e-PKL untuk memberikan kemudahan bagi pemilik kapal dalam membuat PKL secara mandiri dan sistem ini terintegrasi dengan aplikasi Sistem Penerbitan Persetujuan Berlayar (TemanSPB), khususnya daftar awak kapal perikanan (crew list) yang akan dilakukan penyiajian oleh Syahandar di Pelabuhan Perikanan. Telah dilakukan ujicoba penggunaan aplikasi e-PKL di beberapa pelabuhan perikanan terdiri dari: PPN Kejawan, PPS Kendari, PPN Palabuhanratu, PPS Cilacap, PPN Pekalongan, PPN Karangantu, PPS Bungus dan PPS Bitung.

Dalam rangka implementasi perlindungan awak kapal perikanan dalam penerapan Perjanjian Kerja Laut, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan selama tahun 2021 telah melaksanakan sosialisasi Aplikasi e-PKL di PPN Ambon, PPN Ternate, PPN Sungaliat, PPN Kwandang, PP. Teluk Awang (Lombok Tengah), PP. Lampulo (Banda Aceh), PPP. Mayangan (Probolinggo), PPP. Muncar (Banyuwangi), PPP. Puger (Jember), PPP. Pondokdadap (Malang), PP. Merauke, PPP. Tamperan (Pacitan), PPP. Sadeng (D.I. Yogyakarta). Implementasi penggunaan Aplikasi e-PKL secara optimal dan efektif direncanakan berlaku tahun 2022.

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAK-L) Tahun 2021, kegiatan fasilitasi penerapan PKL ditargetkan sebanyak 1.700 orang pelaku usaha dan awak kapal perikanan. Sesuai data capaian penerapan PKL di masing-masing UPT Pelabuhan Perikanan selama tahun 2021 sebanyak 76.597 orang.





Dokumentasi kegiatan sosialisasi PKL

3.3. Sasaran Kegiatan (SK-3) : Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri

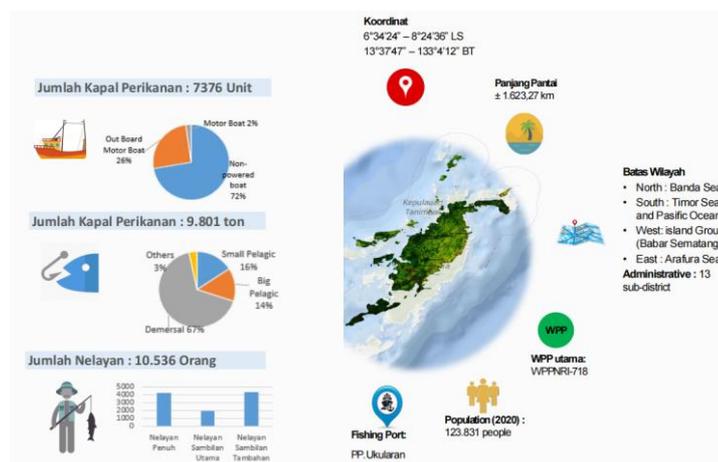
3.3.1. IKU.05. Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki (skala kemandirian)



Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan, yang selanjutnya disebut SKPT, merupakan pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu mulai dari hulu sampai ke hilir berbasis kawasan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 8 tahun 2017 Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2016 Tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan, diamanatkan bahwa Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagai pelaksana di SKPT Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku, dengan tugas:

1. menyusun rencana aksi pembangunan SKPT secara terintegrasi;
2. melaksanakan operasional kegiatan pembangunan SKPT;
3. melakukan koordinasi dan konsultasi teknis antarunit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta lintas Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian/ Pemerintah Daerah/Instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan SKPT;
4. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan SKPT;
5. melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan SKPT secara berkala setiap bulan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I;
6. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
7. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;

8. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; i. melaksanakan kegiatan swakelola;
9. memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) atas perjanjian/ kontrak yang dilakukannya;
10. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
11. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
12. membuat dan menandatangani SPP;
13. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
14. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
15. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
16. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

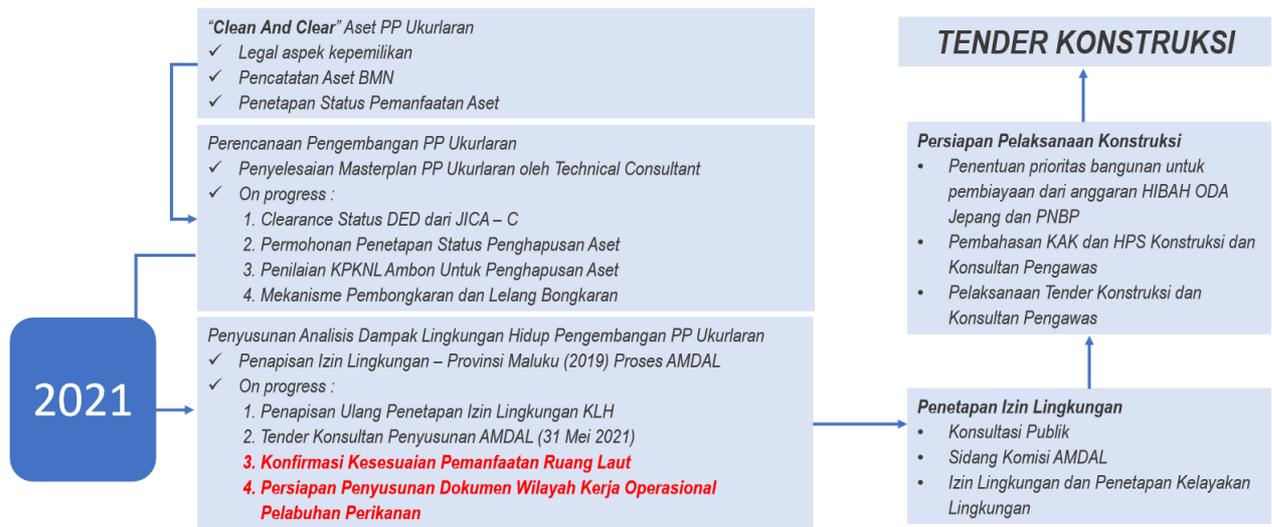


Sumber pembiayaan pengembangan SKPT Saumlaki berasal dari Kerja Sama luar negeri berupa Hibah Budget Support ODA Japan Pengembangan PP Ukurlaran dan Anggaran Pendapatan dan



Belanja Pemerintah sebagai dana pendamping. Indikator keberhasilan dari kegiatan pengembangan SKPT Saumlaki adalah tingkat kemandirian SKPT Saumlaki dengan nilai IV. Progres Kegiatan Pengembangan SKPT Saumlaki Kegiatan pengembangan SKPT Saumlaki sudah dimulai sejak tahun 2017. Secara rinci progres dan rencana pengembangan SKPT Saumlaki sejak tahun 2017 s.d. 2023 dijelaskan sebagai berikut:

Kegiatan SKPT Saumlaki tahun 2021 yang telah dilaksanakan sebagai berikut:



Gambaran Operasional Perikanan Tangkap di SKPT Saumlaki Tahun 2021:

- Jumlah kunjungan kapal : frekuensi kunjungan 444 unit
- Volume produksi: 226.332,80 kg
- Nilai tingkat kemandirian : Nilai rata-rata 0,76; Kategori pra mandiri IV

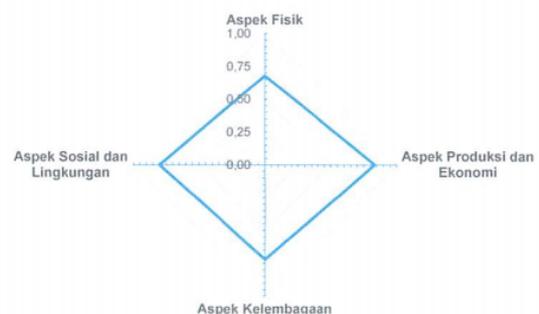
PENILAIAN STATUS PENGELOLAAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) MANDIRI

Nama Lokasi : SKPT SAUMLAKI - KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
PROVINSI MALUKU
Periode : 2021

Status	Nilai	Kategori
Pra Mandiri 1	0.25	Pra Persiapan
Pra Mandiri 2	≥ 0.25 dan < 0.5	Persiapan
Pra Mandiri 3	≥ 0.5 dan < 0.75	Terbangun
Pra Mandiri 4	≥ 0.75 dan < 1	Terkelola
Mandiri	1	Terkelola Efektif

Kriteria	Pra Mandiri 4
Aspek Fisik	0,68
Aspek Produksi dan Ekonomi	0,83
Aspek Kelembagaan	0,72
Aspek Sosial dan Lingkungan	0,80
Nilai Rata-Rata	0,76

STATUS SKPT : **Pra Mandiri 4**



Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki Tahun 2021 disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18. Capaian tingkat kemandirian sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) saumlaki Tahun 2021

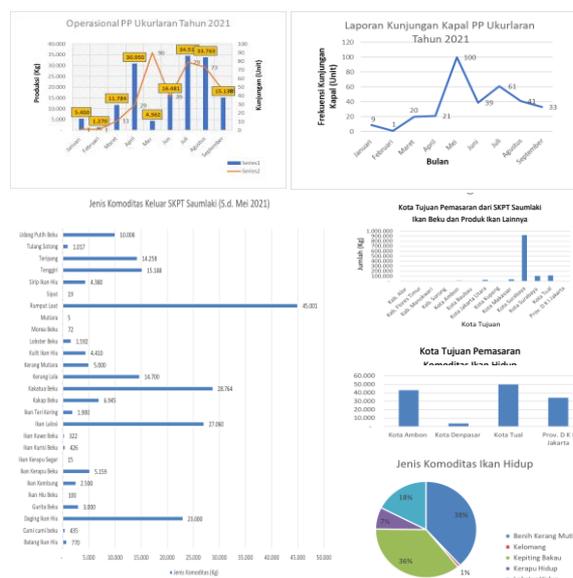
No	Komponen Indikator Kinerja	TW IV
1.	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki	4
Capaian		4

Focus Group Discussion pengembangan PP Ukurlaran



Kegiatan FGD Pengembangan PP Ukurlaran SKPT Saumlaki

Keragaan Operasional PP Ukurlaran SKPT Saumlaki Tahun 2021



3.4. Sasaran Kegiatan (SK-4) : Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

3.4.1. IK.06. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. IP ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (PermenPAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni:

- a. Kualifikasi, diukur dari riwayat Pendidikan yang telah dicapai mulai dari dibawah SLTA sampai dengan Pendidikan S-3;
- b. Kompetensi, diukur dari riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Seminar / Workshop / Konferensi / Setara;
- c. Kinerja, diukur dari penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil meliputi: Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja;
- d. Disiplin Pegawai, diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi: Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Persentase Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2021 disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19. Capaian persentase indeks profesionalitas ASN Tahun 2021

No	Komponen Indikator Kinerja	TW II	TW IV
1.	IP-ASN Dit.KAPI Semester I	58,09	78,45
Capaian		58,09	78,45

Capaian persentase indeks profesionalitas ASN Tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2020 sebesar 53,16% dan pada tahun 2021 sebesar 78,45%. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan memperoleh capaian sebesar 78,45 (107,46%) pada Triwulan IV (Semester II) dari target 73. Capaian tersebut diperoleh karena kesadaran pegawai dalam menginput atau mengupdate data/sertipikat pelatihan/bimtek pada aplikasi e-pegawai KKP dan petugas operator e-pegawai yang rajin mengingatkan. Adapun kendala yang dihadapi pegawai bidang administrasi umum yaitu keterbatasan akses terhadap peningkatan kompetensi/kemampuan ASN berupa pelatihan / bimtek. Solusi kedepan adalah memfasilitasi kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis terhadap pegawai staf administrasi umum.

3.4.2. IK.07. Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)

Nilai rekonsiliasi kinerja adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja (Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP). Nilai diperoleh dari hasil evaluasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) setiap tahunnya, terhadap 5 (lima) komponen SAKIP di KKP: (i) Perencanaan Kinerja; (ii) Pengukuran Kinerja; (iii) Pelaporan Kinerja; (iv) Evaluasi Kinerja; (v) Pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Capaian Nilai rekonsiliasi kinerja adalah hasil penilaian Kemenpan RB atas implementasi SAKIP dengan menggunakan instrumen (lembar Kerja Evaluasi) yang sudah dirumuskan oleh KEMENPAN-RB dengan nilai diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh KemenPAN Tahun 2020. Dalam hal KemenPAN tidak melakukan evaluasi, maka data capaian dapat diambil dari hasil pengukuran mandiri tim internal KKP (Inspektorat Jenderal KKP) dengan menggunakan pedoman dari KemenPAN-RB. Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2021 disajikan pada Tabel 20.

Tabel 20. Capaian nilai rekonsiliasi kinerja Tahun 2021

No	Komponen Indikator Kinerja	TW IV
1.	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	85,56
Capaian		85,56

Sesuai Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatur pengelolaan kinerja melalui Peraturan Menteri Kelautan nomor 68 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis, Rekonsiliasi Kinerja Satker Pusat dan Penilaian Mandiri SAKIP Satker UPT. Penilaian rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan terdiri dari nilai aspek kepatuhan, kesesuaian, dan ketercapaian masing-masing unit kerja. Adapun dokumen yang dinilai dalam rekonsiliasi kinerja yaitu : a) Perjanjian Kinerja (PK) Level II; b) Manual IKU Level II; c) Rincian Target IKU Level II; d) Rencana Aksi Level II; dan e) Laporan Kinerja Level II. Hasil dari Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA TAHUN 2021										
NAMA UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap									
NAMA UNIT YBS	Direktorat Kapal Penangkapan Ikan									
USER KINERJAKU	30302000									
TANGGAL REKON	03 November 2021									
ASPEK KEPATUHAN	PK	Manual IKU	Rincian Target IKU	Rencana Akai	LKJ / LCK			Data Dukung LKJ/LCK		
	1,00	1,00	1,00	1,00	Tw I	Tw II	Tw III	Tw III*		
Skor	100,00									
Catatan	(jika ada)									
ASPEK KESESUAIAN	DATA DAN INFORMASI				TARGET			REALISASI		
	PK - Manual IKU	PK - Rincian Target	PK - Rencana Akai	Rincian Target IKU - Kinerja	PK - LKJ/LCK Tw III	PK - Kinerja	LKJ/LCK Tw III - Kinerja	LKJ/LCK Tw III - Kinerja		
Skor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
Catatan	(jika ada)									
ASPEK KETERCAPIAN	CAPAIAN KINERJA IKU = IK TAHUN 2021				ASPEK KETEPATAN		Penyampaian LKJ Tahunan			
	Tw I	Tw II	Tw III	pada Aplikasi ESR		Kebiasaan				
Skor	98,95	92,23	105,59	98,26		100,00				
Catatan	(jika ada)									
SKOR	ASPEK PEMILAHAN				SKALA					
	KEPATUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPIAN	KETEPATAN						
Bobot	25%	25%	30%	20%						
Skor per aspek	100,00	100,00	98,26	55,00						
Skor dikali Bobot	25,00	25,00	24,56	11,00						
Total Skor	85,56									
CATATAN:	Laporan Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan disampaikan ke aplikasi E-Sakip Reviu pada tanggal 27 Agustus 2021, terlambat dan ketentuan waktu upload tanggal 17 Februari 2021 sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan									
	Pembahas I (Paramitha Prima)			Unit yang di Sampling (Paringgaman Tambubolon)			Pembahas II (Cut Pinta Keumata)			

Hasil penilaian SAKIP, Dit.KAPI memperoleh nilai rekonsiliasi sebesar 85,56 (100,48) dari target 85,15. Capaian nilai rekonsiliasi kinerja Tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 sebesar 53,43. Kedepannya diharapkan Dit.KAPI mengalami peningkatan nilai SAKIP dengan disiplin dalam menyampaikan dokumen kinerja khususnya laporan kinerja serta memperhatikan kesesuaian antara laporan kinerja dengan data dukung yang disampaikan.

3.4.3. IKU.08. Persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar (persen)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Pengukuran indikator sistem manajemen pengetahuan yang terstandar menggunakan aplikasi Bitrix24. Bitrix24 dapat diakses melalui alamat web kinerjakp.bitrix24.com atau dapat diunduh di *appstore / play store* pada perangkat *smartphone*. Perhitungan penerapan manajemen pengetahuan lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dilakukan atas 3 (tiga) komponen, yaitu:

- Dokumen (bobot 20%)
- Keikutsertaan (bobot 10%)
 - Pejabat Eselon II, dan Fungsional Tertentu yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator dan Sub Koordinator;
 - Pelaksana (minimal 2 orang di bawah Sub Koordinator).
- Keaktifan (bobot 70%)

- Pejabat Eselon II dan Pejabat Fungsional Tertentu (yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator dan Sub Koordinator) diharuskan melakukan posting keaktifan minimal 3 kali pada setiap triwulan;
- Informasi yang disampaikan harus dilengkapi dengan foto atau video atau notulensi atau bahan paparan yang bersifat boleh dipublikasikan, dengan kriteria informasi narasi yang memenuhi unsur Apa, Dimana, Kapan, Siapa, Kenapa dan Bagaimana. (5W1H = What, Where, When, Who, Why and How);
- Informasi yang disampaikan juga dapat berupa jurnal, infografis, hasil penelitian dan campaign terkait Perikanan Tangkap.

Persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar (persen) Tahun 2021 disajikan pada Tabel 21.

Tabel 21. Capaian persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar Tahun 2021

No	Komponen Indikator Kinerja	TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar (%)	41,05 %	90,40 %	88,33 %	100%
Capaian Rata-Rata = (TW I + TW II + TW III + TW IV) : 4		(41,05% + 90,40% + 88,33% + 100%) : 4			79,94
Capaian					95,16%

Penilaian IKU MP DIT. KAPI TW 4 (31 Desember 2021 - 16.30 WIB)

Dokumen	Target	Capaian	%
Perjanjian Kinerja	1	1	100,00
Manual IKU	1	1	100,00
Laporan Kinerja	1	1	100,00
TOTAL	3	3	100,00

Keikutsertaan	Target	Capaian	%
Level 2	1	1	100,00
Level 3	4	4	100,00
Level 4	9	9	100,00
Staf	18	18	100,00
TOTAL	32	32	100,00

Keaktifan	Target	Capaian	%
Koordinator	12	12	100,00
Sub Koordinator	27	27	100,00
TOTAL	39	39	100,00

Komponen	Capaian	Bobot	%
Dokumen	100,00	20	20,00
Keikutsertaan	100,00	10	10,00
Keaktifan	100,00	70	70,00
TOTAL			100,00

TW 1	41,05
TW 2	90,40
TW 3	88,33
TW 4	100,00
Rata-rata	79,95

Persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar pada Triwulan IV memperoleh capaian sebesar 100%, dengan capaian rata-rata dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar 79,94%. Capaian persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar Tahun 2021 mengalami penurunan dari capaian tahun 2020 yaitu sebesar 97,41%. Hal ini disebabkan kurangnya keaktifan pegawai dalam memposting atau mengupdate informasi pada aplikasi Bitrix24 pada Triwulan I. Solusi kedepan adalah rajin mengingatkan kembali kepada pegawai yang terdaftar dalam aplikasi Bitrix24 untuk memposting dan mengupdate informasi seputar perikanan tangkap sesuai dengan kriteria informasi narasi yang memenuhi unsur 5W + 1H yaitu *What, Where, When, Who, Why, dan How*.

peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 sebesar 79,06% dan pada tahun 2021 sebesar 100%.

3.4.5. IK.10. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)

Indikator ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan / efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis lingkup Dit. KAPI. Tingkat efektifitas merujuk pada suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Kegiatan dikategorikan prioritas/strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki dampak langsung kepada masyarakat;
- b. Memiliki anggaran besar;
- c. Mendukung secara langsung target kinerja KKP;
- d. Mendukung capaian prioritas nasional;
- e. Merupakan arahan direktif Presiden, dan
- f. Pertimbangan lainnya yang relevan.

Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen) Tahun 2021 disajikan pada Tabel 23.

Tabel 23. Capaian tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2021

No	Komponen Indikator Kinerja	TW IV (%)
1.	Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah Alat Penangkapan Ikan (API)	93,53
2.	Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah Mesin Kapal Perikanan	97,50
Capaian Rata-Rata = (93,53+97,50):2		95,51

Capaian tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 sebesar 70 dan pada tahun 2021 sebesar 95,51.

Sesuai dengan Surat Inspektorat Jenderal KKP Nomor : T.1037/ITJ.2/HP.410/X/2021 Perihal Hasil Evaluasi Efektivitas Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap TA 2020 maka hasil evaluasi tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/bantuan pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah Lingkup DJPT Tahun 2020

JENIS BANTUAN	JUMLAH*		SKOR			
	BANTUAN	DIEVALUASI	PT	IG	AT	TOTAL
Alat Penangkapan Ikan (API)	63	63	76,03	9,25	8,25	93,53
Mesin Kapal Perikanan	8	8	80,00	7,50	10,00	97,50
<i>Chest Freezer</i>	80	77	73,70	8,08	3,90	85,68
Kendaraan Roda 3 Berinsulasi	41	41	76,83	8,35	3,41	88,60
TOTAL DJPT	192	189	75,42**	8,51**	5,50**	89,43**

Keterangan:

* Jumlah dimaksud adalah pada lokasi Uji Petik

** Merupakan skor rata-rata gabungan jenis bantuan DJPT

a. Alat Penangkapan Ikan (API)

Sebanyak 58 dari 63 koperasi/KUB penerima bantuan API atau sebesar 92,06% meningkat pendapatannya setelah menerima bantuan, dengan rincian 11 penerima di Provinsi Lampung, 5 penerima di Provinsi Jawa Barat, 15 penerima di Provinsi Jawa Timur, dan 27 penerima di Provinsi NTB. Peningkatan pendapatan tersebut berasal dari peningkatan hasil tangkapan kurang lebih berkisar antara 2 s.d. 5 kg per trip penangkapan.

b. Mesin Kapal Perikanan

Seluruh penerima bantuan mesin kapal perikanan (delapan koperasi/KUB) di Kab. Pangandaran Provinsi Jawa Barat masih mengoperasikan bantuan untuk kegiatan penangkapan ikan dan meningkat pendapatannya sekitar Rp1.000.000,00 per trip penangkapan.

3.4.6. IK.11. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen).

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2020 (bobot 10%)
- Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga Triwulan IV Tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%)
- Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017 – 2020 (bobot 20%)
- Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST) / Berita Acara Pemakaian (bobot 20%)

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen) Tahun 2021 disajikan pada Tabel 24.

Tabel 24. Capaian tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen) Tahun 2021

No	Komponen Indikator Kinerja	TW IV (%)
1.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	80
Capaian		80

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP 6 tahun 2006 tentang pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN dan belanja, sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap maupun aset lainnya.

Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (controlling) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (disposal).

Saldo awal laporan barang milik negara satker pembantu Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan pada 1 Januari 2021 senilai Rp0,00. Secara rinci nilai saldo awal barang milik negara satker pembantu Direktorat KAPI disajikan pada Tabel 25.

Tabel 25. Saldo Awal Semester 1 Tahun 2021

AKUN NERACA		JUMLAH		
KODE	URAIAN	NILAI BMN	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO
1	2	3	4	5
117111	Barang Konsumsi	0	0	0
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada	0	0	0
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke	0	0	0
117129	Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
132111	Peralatan dan Mesin	0	0	0
133111	Gedung dan Bangunan	0	0	0
135111	Aset Tetap dalam Renovasi	0	0	0
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0	0
162151	Software	0	0	0
162171	Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	0	0	0
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	0	0
J U M L A H		0	0	0

Neraca laporan barang milik negara pada periode 30 Juni 2021 pada satker pembantu Direktorat KAPI disajikan pada Tabel 26.

Tabel 26. Neraca 30 Juni Tahun 2021

AKUN NERACA		JUMLAH		
KODE	URAIAN	NILAI BMN	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO
1	2	3	4	5
117111	Barang Konsumsi	0	0	0
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada	0	0	0
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke	0	0	0
117129	Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
132111	Peralatan dan Mesin	7.843.524.071	6.574.539.161	1.268.984.910
133111	Gedung dan Bangunan	0	0	0
135111	Aset Tetap dalam Renovasi	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0	0
162151	Software	0	0	0
162171	Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	178.700.000	178.700.000	0
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	1.068.494.250	546.900.000	521.594.250
J U M L A H		9.090.718.321	7.300.139.161	1.790.579.160

Berdasarkan tabel 26 neraca barang milik negara satker Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan per 30 Juni 2021 adalah Rp9.090.718.321,00 dengan akumulasi penyusutan senilai Rp7.300.139.161,00 sehingga nilai buku Rp1.790.579.160,00.

BAB IV. PENUTUP

Dalam mewujudkan sasaran kegiatan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan tahun 2021 secara keseluruhan tercapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian pelayanan publik antara lain, pelayanan persetujuan pengadaan kapal perikanan (P2KP), buku kapal perikanan (BKP), rekomendasi pemeriksaan fisik kapal dan alat penangkapan ikan dalam rangka penerbitan dokumen perizinan usaha perikanan tangkap, serta sertifikasi dan perlindungan awak kapal perikanan.

Dari 11 (sebelas) Indikator Kinerja pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebanyak 10 Indikator tercapai dan 1 indikator yang belum optimal mencapai target yaitu Persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar dengan capaian 95,16% dengan realisasi 79,94% dari target sebesar 84%. Hal ini disebabkan kurangnya keaktifan pegawai pada Triwulan I dalam memposting atau mengupdate informasi pada aplikasi Bitrix24 sehingga menyebabkan perhitungan rata-rata pada triwulan berikutnya menjadi rendah. Kedepan, diharapkan seluruh pegawai yang terdaftar dalam aplikasi Bitrix24 supaya memposting dan mengupdate informasi seputar perikanan tangkap sesuai dengan kriteria informasi narasi yang memenuhi unsur 5W + 1H yaitu *What, Where, When, Who, Why, dan How*.

Dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja ini akan menjadi bahan perbaikan pada tahun berikutnya. Untuk itu, rencana aksi yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Melakukan perencanaan kegiatan dan anggaran dengan tepat;
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai jadwal atau rencana operasional kegiatan (ROK) sehingga anggaran dapat diserap dengan baik dan tidak menumpuk pada akhir tahun;
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan untuk IKU yang pencapaiannya pada akhir tahun.
4. Pelaksanaan monitoring capaian output dan realisasi anggaran bulanan bukan hanya membahas mengenai capaian output dan realisasi anggaran di dalam Rencana Kerja, akan tetapi akan dikombinasikan dengan fokus realisasi Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021.

Laporan Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2021 ini menjadi bahan evaluasi kinerja dan masukan dalam optimalisasi pelaksanaan rencana kegiatan tahun berikutnya. Terima kasih

BAB V. LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 3519070 (EXT:1239), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAN: <https://kkp.go.id/djpt>, SURAT ELEKTRONIK: djpt@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mansur**

Jabatan : Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Muhammad Zaini**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 September 2021

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Pihak Pertama
Direktur Kapal Perikanan dan Alat
Penangkapan Ikan


Muhammad Zaini


Mansur

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

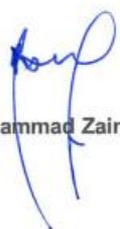
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Pengelolaan sarana perikanan tangkap yang berdaya saing	1 Jumlah kapal perikanan yang terbangun, terstandarisasi, terdaftar dan/atau yang memenuhi ketentuan (unit)	3.400
	2 Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan memenuhi ketentuan (unit)	12.000
	3 Persentase mesin dan kapal perikanan yang dihitung produktivitasnya dan terpantau operasionalnya (persen)	100
2. Pengelolaan awak kapal perikanan yang berdaya saing	4 Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi (orang)	15.000
3. Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri	5 Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki (tingkat kemandirian 1-5)	4
4. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	6 Indeks Profesionalitas Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	73
	7 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	85,15
	8 Persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar (persen)	84
	9 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	65
	10 Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	72,5
	11 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	72,5

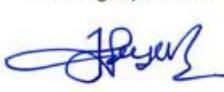
Program : Pengelolaan Kelautan dan Perikanan
 Anggaran Tahun 2021 : Rp. 14.433.332.000,-

Jakarta, 1 September 2021

Pihak Kedua
 Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Pihak Pertama
 Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan


 Muhammad Zaini


 Mansur